

**KEKUATAN POLITIK BIROKRASI**  
**(Studi Terhadap Kemenangan Petahana Hatta Rahman Pada**  
**Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2015)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar  
Sarjana Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pada Fakultas  
Ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

**MUH.IRFAN**

NIM: 30600113140

**FAKULTAS USHULUDDIN FILSAFAT DAN POLITIK**  
**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh.Irfan  
Nim : 30600113140  
Tempat/Tgl Lahir : Majang, 17 November 1994  
Jurusan : Ilmu Politik  
Fakultas : Ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
Alamat : Jl. Dg Tata 1 (Pondok Lestari) Blok 5/G2 No.6  
Judul Skripsi : Kekuatan Politik Birokrasi (Studi Terhadap Kemenangan  
Petahana Hatta Rahman Pada Pilkada Kabupaten Maros  
Tahun 2015)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa , 29 Maret 2018

Penyusun,

**MUH. IRFAN**  
**NIM. 30600113140**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kekuatan Politik Birokrasi (Studi Terhadap Kemenangan Petahana Hatta-Rahman Pada Pilkada Kabupaten Maros Tahun 2015” yang disusun oleh Muh. Irfan, NIM: 30600113140, mahasiswa Jurusan Ilmu Politik pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 29 Maret 2018 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	:	Dr. H. Mahmuddin, S. Ag., MAg	(.....)
Sekretaris	:	Syahrir Karim, S.Ag., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	:	Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si.	(.....)
Munaqisy II	:	Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	:	Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	:	Fajar, S.Sos, M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh,  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik  
UIN Alauddin Makassar



**Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA.**  
NIP. 19590704 1989031 1 003

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segenap puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, atas segala curahan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw, seorang revolusioner paling agung, juga teriring salam untuk keluarga beliau, para sahabat, dan segenap manusia yang mengikuti jejak dan sunnah beliau sampai akhir zaman.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya terbaik dalam penulisan skripsi ini. Namun demikian dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik, penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang membangun dari pihak manapun.

Selesainya seluruh kegiatan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan berbagai pihak, baik moril maupun materil. Terutama dari kedua orang tua yang doanya tidak pernah putus menemani perjuangan dalam meraih cita dan cinta dalam hidup saya Perkenankan pula penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Musaffir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Prof. Dr. H. Muh. Natsir Siola selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, serta Wakil Dekan I Dr. Tasmin, M. Ag Wakil Dekan II Dr. H. Mahmuddin, S.Ag, M.Ag dan Wakil Dekan III Dr. Abdullah, M.Ag.
3. Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik dan Syahrir Karim, M.Si, Ph.D selaku sekretaris Jurusan.
4. Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP., M.Si. selaku pembimbing I dan Fajar, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II yang selalu memberi masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Muhammad Ramli, M.Si selaku penguji I dan Ismah Tita Ruslin, S.IP, M.Si, selaku penguji II.

6. Para Dosen Jurusan Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan yang berharga dan sangat bermanfaat bagi penulis serta staf Jurusan Ilmu Politik dan staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik yang sangat membantu dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada sahabat-sahabat IPO Angkatan 2013. Yang Terspesial seperjuangan HMJ ipo masa periode 2015-2016. Riska, Ilyas, Wowo, Fandi, Yumi, Fajri, Arif, Arez, Erwin, Ibnu. senior-senior ilmu politik, adik-adik ilmu politik, Teman;teman KKN 53 Uin; Caca Rijal, Tika, Amma, Ippan, Mujahida Terkhusus solidaritas ilmu politik 7.8. Teman-teman SMP Wandu, Niswan. Mardin, Ida, Yuti, Lisda. Tanpa kecuali yang telah menemani semua langkah selama belajar di kampus tercinta ini,

Samata-Gowa, 28 Maret 2018  
Penyusun,

**MUH. IRFAN**

NIM. 30600113140

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	12
D. Tinjauan Karya Terdahulu .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Teori.....	21
1. Teori Komunikasi Politik.....	21
2. Teori Strategi Politik.....	24
3. Teori Birokrasi .....	25
B. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis Data .....	32
C. Metode Pengumpulan Data .....	33
D. Instrumen Penelitian .....	34
E. Teknik Pengelolahan dan Analisis Data .....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Sejarah Kabupaten Maros .....	36
2. Letak Geografis Kabupaten Maros .....	38
3. Data Penduduk dan Ketenagakerjaan .....	39
4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	41
B. Profil Hatta Rahman .....	44
C. Bentuk Kekuatan Politik birokrasi dalam Mendukung Kemenangan Hatta Rahman Pada Pilkada Kab. Maros Tahun 2015 .....	54
1. Jaringan yang Luas dan Sistem Organisasi yang Massif .....	56
2. Akses terhadap Penguasaan Sumber Daya .....	59
3. Instrumen Komunikasi Pemerintah .....	62
4. Pelaksana Kebijakan Publik .....	65
5. Representasi Kepemimpinan Politik .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Implikasi .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>74</b>

## ABSTRAK

**Nama : MUH. IRFAN**  
**NIM : 30600113140**  
**Judul : Kekuatan Politik Birokrasi (Studi terhadap Kemenangan Petahana Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015)**

---

Skripsi ini membahas tentang kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada di Kab. Maros tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk memahami bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada di Kabupaten Maros tahun 2015.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi politik, teori komunikasi politik, dan teori birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu strategi politik yang dilakukan *incumbent* untuk memenangkan kontestasi pemilu adalah dengan memanfaatkan kekuatan birokrasi. Adapun beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015 antara lain; jaringan yang luas dan sistem organisasi yang masif, akses terhadap penguasaan sumber daya, instrumen komunikasi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, dan representasi kepemimpinan politik.

Posisi Hatta Rahman selaku calon *incumbent* dapat dengan mudah mempengaruhi dan memobilisasi dukungan politik dari kalangan birokrat. Sebab pola-pola patrimonial masih bekerja cukup kuat dalam sistem birokrasi. Selain itu birokrasi dapat menjadi media komunikasi yang efektif bagi calon *incumbent* termasuk Hatta Rahman untuk berkomunikasi dan memperoleh simpati dan dukungan politik dari masyarakat. Modal lain yang juga dimiliki Hatta Rahman dalam memenangkan Pilkada adalah pengalaman organisasi serta dukungan partai politik.

Keterlibatan dalam politik adalah hak dari setiap warga negara, namun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrasi harus menghindari keterlibatan pada politik praktis, sehingga birokrasi dapat memaksimalkan fungsi dan perannya dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Belajar dari kesalahan masa lalu merupakan suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan jika orang ingin lebih berhasil di masa depan. Kegagalan masa lalu akan bisa menjadi pedoman tentang apa-apa yang harus diubah dan di perbaiki agar kemudian tidak terulang lagi di masa depan. Demikian pula dengan persoalan Birokrasi. Orde Baru merupakan gudang pengalaman tentang praktek birokrasi yang sama sekali tidak mencerminkan pencapaian tujuan negara. Padahal birokrasi ada demi mencapai tujuan negara. Birokrasi ada bukan untuk melayani atau mengabdikan pada tujuan negara, namun justru harus melayani dan mengabdikan pada birokrasi. Bukan memecahkan problem bangsa dan negara, namun justru menciptakan berbagai problem bangsa dan negara karena ketidak efisienan dan ketidak responsifannya terhadap kondisi dan realitas yang ada.<sup>1</sup>

Secara umum, dapat dikatakan bahwa birokrasi semasa orde baru sangat diwarnai oleh kekuatan politik yang menjadi rezim yang berkuasa pada saat itu yakni militer. Pada saat itu birokrasi sipil mengalami proses militerisasi, mulai dari strukturnya sampai dengan kulturnya. Singkatnya kualitas mental intelektual yang terbangundalam diri aparatur birokrasi pada masa orde baru jauh dari seperti apa yang dideskripsikan Weber sebagai birokrasi modern. Tak ada profesionalisme dan rasionalitas, malahan wajah birokrasi saat itu adalah feodal dan irasional.

---

<sup>1</sup>Titik Djumiarti, "Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)", *journal* Vol 1, Th. 2014, h. 2.

Setelah jatuhnya rezim orde baru Soeharto, format dan pola pemerintahan daerah-termasuk pemilihan kepala daerah-direvisi mengikut jiwa zaman yang tengah bertransformasi. Hasilnya terbit dua undang-undang pemerintahan daerah di waktu yang relatif berdekatan yaitu UU No. 22 tahun 1999 dan UU. 32 2004. Dari banyak butir yang di tuangkan dalam pasal dan ayat pada undang undang yang disebutkan terakhir, salah satunya membahas kepala daerah secara demokratis, dan prosedur itu di namakan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).<sup>2</sup>

Gambaran pemilu sebagai upacara ritual yang mempresentasikan perbedaan-dalam kesatuan ini kemudian di kemas lebih lanjut untuk semakin mengecilkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Pada bulan Februari 1981, Presiden Soeharto menyebut Pemilu sebagai “*Pesta demokrasi*”, sebuah konsep yang kemudian selalu di dengung-dengunkan oleh aparat birokrasi negara. Cara pandang ini berusaha menciptakan gambaran bahwa tidak ada lagi perbedaan yang mengancam kesatuan negara. Dengan demikian, Pemilu yang menentukan wakil-wakil rakyat dari berbagai aspirasi tidak lagi di pandang sebagai konflik tapi sebagai sebuah pesta Bhineka Tunggal Ika di bawah naungan negara. Seperti yang di katakan oleh Pemberton<sup>3</sup>

Analisis Nordholt dan Pemberton di atas memaparkan upaya pemerintah untuk mempresentasikan pemilu. Representasi Pemilu sebagai aksi ritual dan sebagai pesta demokrasi tersebut di atas hanyalah merupakan desain desain-desain yang di rancang dari atas untuk kemudian di terapkan ke bawah. Kalau masyarakat menerima Pemilu sebagai sebuah upacara ritual dan pesta demokrasi, mereka tidak akan melakukan

---

<sup>2</sup> Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.130.

<sup>3</sup> Pemberton dalam Alexander Irwan, *Pemilu pelanggaran asas luber* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.45.

resistensi yang berarti, dan dengan demikian praktek dominasi juga tidak perlu dilakukan oleh aparat negara. Apabila ini terjadi, berarti pemerintah berhasil memahami nilai-nilai, jalan-jalan pikiran, dan kepentingan kelompok-kelompok dalam masyarakat dan menemukan cara-cara komunikasi yang tepat untuk meyakinkan masing-masing kelompok bahwa kepentingan yang di kejar negara juga merupakan kepentingan mereka masing-masing.<sup>4</sup>

Pilkada atau pilukada merupakan sebagian kecil dari pelaksanaan sekaligus proses demokrasi di ranah lokal. Ini karena mekanisme ini hanya memberi ruang partisipasi yang amat terbatas dalam proses demokrasi pada aspek pemberian suara semata. Sementara aspek demokrasi yang lebih luas terdapat pada skop politik keseharian (*days to days politics*) justru yang berlangsung setelah pilukada itu berlangsung sehingga datang pemilihan selanjutnya. Namun demikian, kita tidak dapat meremehkan peran pilukada dalam proses pendalaman demokrasi sebab melalui inilah masyarakat menentukan pemimpin daerah yang kemudiannya akan mewarnai kehidupan sosiopolitik, sosiokultur dan sosioekonomi daerah.<sup>5</sup>

Salah satu pelaksanaan ide dasar dari pemberian otonomi kepala daerah sejatinya adalah: *pertama*, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; *kedua*, memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); *ketiga*, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Hal ini sangat relevan bila kita sandingkan dengan konsepsi tujuan desentralisasi dan pemberian otonomi yang bersifat universal. Di manapun di belahan

---

<sup>4</sup>Alexander Irwan, *Pemilu pelanggaran asas luber* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), h.46.

<sup>5</sup>Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2014), h.131.

bumi ini, keberadaan dan fungsi pemerintahan daerah atau daerah otonom adalah di upayakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (*publik service delivery*). Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah adalah unit organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dinilai paling mampu menerjemahkan aspirasi,kebutuhan,dan kepentingan warga masyarakat setempat yang perlu di layani atau di penuhi aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Selain itu, pilkada langsung pun sangat berhubungan dengan upaya *depening democracy at local level*. Dalam konteks otonomi atau desentralisasi, tentu saja, Pilkada langsung harus di mengerti dan di pahami sebagai fungsi dan penciptaan *effective governance*: ketatapemerintahan yang pelaksanaan peranannya sepenuhnya di tujukan pada penguatan kapasitas diri (pemerintah) dan masyarakatnya. Dalam bahasa umum *effective governance* ini dapat di pertukarkan dengan *good local governance*. Merujuk pada Joel Migdal (1988), *effective governance* menyangkut kapabilitisas dan kapasitas negara-dalam hal ini aparatur pemerintah-untuk melaksanakan penetrasi pada masyarakatnya,mengatur relasi sosial (*social control*),mengambil sumber daya (*extracing*) dan mengelola sumber daya (*apporoprating*). Lebih lanjut, kapabilitas negara, dalam pandangan dan argumen Migdal, menyangkut peran kontrol sosial negara, yaitu: peran yang membuat warga masyarakat melakukan apa yangsebutulnya tidak mereka ingin lakukan (yang diikat melalui kebijakan). Pilkada langsung,mau tidak mau dalam konteks ini, menjadi instrumen penting dalam memfalitasi warga untuk terlibat dalam negosiasi permanen

---

<sup>6</sup>Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yoygyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.26.

mengenai: (i) bagaimana dan (ii) dengan sumber daya apa politik lokal harus di atur, serta (iii) ke mana politik lokal harus di bawa.<sup>7</sup>

Di kebanyakan negara demokrasi di dunia barat, pemilu di anggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian di sadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolok ukur. Misalnya Robert Dahl (1999) dalam bukunya *on democracy* menyatakan bahwa pemilu merupakan salah satu lembaga politik yang di butuhkan oleh demokrasi skala besar. Dahl menyatakan demokrasi skala besar membutuhkan:<sup>8</sup>

- a. Para pejabat yang di pilih;
- b. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
- c. Kebebasan berpendapat;
- d. Akses ke sumber-sumber informasi alternatif;
- e. Otonomi asosiasional;
- f. Hak kewarganegaraan yang inklusif (mencakup semuanya).

Para pejabat yang di pilih, kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang di pilih oleh warga negara. Jadi pemerintahan demokrasi skala yang modern merupakan perwakilan.

Dalam memilih pemimpin terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang paling utama sebaiknya dari kalangan mukmin sebagaimana dalam firman Allah swt. pada Q.S. An-Nisa Ayat 144 sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h.27.

<sup>8</sup>Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 134.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi WALI (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah swt.(untuk menyiksamu)?.”<sup>9</sup>*

Jika mengamati ayat diatas dapat disimpulkan bahwa selama umat Islam masih memiliki kader yang mempunyai kualitas dan potensi untuk memimpin maka harus diangkat sebagai pemimpin.

Pemilihan umum yang bebas, adil dan berkala. Para pejabat di pilih di tentukan dalam pemilihan umum yang seringkali di adakan dan di laksanakan dengan adil,di mana tindakan pemaksaan agak jarang di pakai. Dan pemilu di laksanakan secara berkala yakni di lakukan dengan teratur misalnya empat tahun atau lima tahun sekali.

Kebebasan berpendapat warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah-masalah persamaan politik yang di definisikan secara luas,termasuk kritik para pejabat, pemerintah rezim, tatanan sosial ekonomi, dan ideologi yang ada.<sup>10</sup>

Pilkada bukan hal yang asing lagi di dengar di negara kita ini yang notabennya negara demokrasi seiring perkembangan zaman jika model model pilkada jaman dulu masih melakukan pemilihan sistem keterwakilan dan beda halnya dengan sekarang

---

<sup>9</sup>Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami'al-Bayan Fi Ta'Wil al-Qur'an*, Juz. 9, Cet. I (Beirut : Mu'Assisah al-Risalah, 2000), h. 336.

<sup>10</sup>Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 135.

sudah menggunakan demokrasi secara langsung. Jadi masyarakat bebas untuk memilih dan dipilih dalam pertarungan politik artinya masyarakat bebas berkreasi untuk ikut terlibat dalam pertarungan politik, bukan lagi segelintir orang yang menjajaki politik.

Dalam pilkada sudah barang tentu memunculkan suatu realitas politik baru bagi Indonesia. Salah satu yang paling kentara adalah bergesernya pola interaksi antara *state* dan *society*. Satu di antara karakteristik penting dari perubahan pola *state-society relation* adalah: masyarakat (dalam hal ini *local bosses* dan *local strongmen*) memerankan peran yang teramat sentral, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan. Peran kelompok masyarakat ini belum bisa dikategorikan dalam arti *civil society*, tapi hanya *societal actors*. Dalam kondisi seperti ini, maka sulit dihindari untuk tidak terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih diwarnai oleh praktik konsensi, transaksi, serta tawar-menawar kepentingan antara *societal actors* dengan *state actors* (para penyelenggara pemerintahan formal). Kasus ‘premanisme proyek’ yang dilakukan oleh para *local bosses* dan *local strongmen* di banyak daerah, misalnya, menunjukkan bahwa karakteristik dari penyelenggaraan pemerintahan daerah jauh lebih kompleks dari apa yang telah dijelaskan oleh sejumlah literatur sejauh ini. Untuk lebih spesifiknya, kasus ‘premanisme proyek’, secara eksplisit mengindikasikan bahwa pada tingkat realitas proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan di daerah telah diwarnai oleh ‘transaksi’, ‘konsesi’, ‘persekongkolan’, ‘korporasi’ dan tawar-menawar kepentingan di antara (local-) *state actors* dengan *societal actors* (*local bosses* dan *local strongmen*).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Leo Agustina, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), h. 250-251.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam memilih pemimpin melalui mekanisme pemilu merupakan wujud terdistribusinya kekuasaan ke tingkat lokal. Hal tersebut melahirkan kekuatan-kekuatan baru dalam konstelasi politik. Kekuatan-kekuatan politik baru tersebut tampil dalam rupa elit-elit politik lokal. Elit-elit politik lokal memainkan peran signifikan dalam berbagai kontestasi politik di tingkat lokal. Kontestasi politik di tingkat lokal menjadi ajang pertarungan politik oleh elit-elit politik untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat. Berbagai strategi politik akan dimainkan demi memenangkan kontestasi politik. Mulai dari pertarungan wacana hingga pertarungan fisik akan dilakukan oleh elit-elit politik maupun para simpatisannya.

Salah satu strategi yang umum digunakan oleh para politisi untuk mempengaruhi persepsi dan preferensi politik masyarakat adalah dengan melalui strategi "*kekuatan politik birokrasi*". Pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi. Birokrasi adalah alat negara. Dalam negara, sebelum ia dijalankan oleh birokrasi maka harus ada pemerintahan yang mengatur birokrasi. Birokrasi dalam konteks publik adalah pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas mengatur terlaksananya tugas-tugas pemerintahan yang baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum.

Yaitu bagaimana upaya untuk mengkonstruksi citra atau identitas sehingga mudah dikenal oleh masyarakat. Citra atau identitas yang dibangun pada dasarnya biasa melalui instansi-instansi sebagai perantara untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang menjadi tujuan para politis. Pesan-pesan tersebut menggambarkan visi dan misi dari seorang politisi. Masyarakat yang menangkap pesan tersebut sebagai



sesuatu yang mewakili kepentingan mereka akan menjadi simpati dan mendukung politisi tersebut sampai pada akhirnya dia terpilih sebagai pemimpin.

Dalam memilih pemimpin sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah untuk memilih sebuah pemimpin yang berakhlak baik dan memiliki tanggung jawab dan harus memilih pemimpin yang kuat artinya kuat dalam segi akhlak dan akidah guna menjalankan amanah yang di pegang sebagai pemimpin rakyat, karena baiknya suatu daerah tergantung bagaimana pemerintah daerah tersebut, seperti sebagaimana yang di sebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sebagai berikut:

رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا".<sup>12</sup>

Artinya :

*"Dari Abu Dzar berkata,saya berkata; Wahai rasulullah, tidaklah anda menjadikanku sebagai (pejabat)? Abu Dzar berkata; Kemudian beliau menepuk bahuku dengan tangan beliau seraya bersabda : Wahai Abu Dzar," kamu ini lemah (untuk memegang jabatan) padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan haq dan melaksanakan tugas dengan benar." (HR. Imam Muslim)*

Hadis di atas menggambarkan bagaimana Rasulullah menganjurkan memilih pemimpin yang memiliki potensi dan kualitas untuk memimpin karena

---

<sup>12</sup>Sa'id Hawwa, *al-Aqa'id al-Islamiyah*, Juz 1, Cet. II (Beirut: Dar al-Salam Liltaba 'ih wa al-Nasyar, 1992), h. 66.

pertanggungjawaban di kemudian hari sangatlah berat. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang memiliki akhlak dan akidah yang baik.

Pilkada tahun 2015 yang lalu menjadi momentum bagi menguatnya penggunaan *kekuatan politik birokrasi* oleh para politisi. Kabupaten Maros merupakan satu diantara sekian banyak daerah yang melangsungkan pilkada serentak di Indonesia. Masyarakat Indonesia kembali memilih bakal calon pemimpin baru di daerah masing-masing. Pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu menjadi fenomena di mana diikuti 9 provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Adapun yang terdapat di Sulawesi selatan seperti daerah: Maros, Bulukumba, Selayar, Gowa, Pangkep, Tana Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Barru, Soppeng, Luwu Timur. Di Maros sendiri diikuti beberapa kandidat 1. Imran Yusuf & Said Patombongi 2. Husain Rasul & Andi Sudirman 3. Hatta Rahman & Harmil Mattorang.

Sepak terjang dalam ranah politik seorang Hatta Rahman sudah tidak asing lagi terbukti karena sudah kali keduanya menjabat sebagai bupati di Maros, artinya kepercayaan masyarakat sudah dia pegang untuk menjadi pemimpin, terpilihnya kali ini tidak begitu mudah jalanya sebab sebelum pencalonannya kembali dia di tuduh dalam kasus korupsi pengadaan lampu Led, dan beberapa kasus lain. Tapi dengan pengalaman seorang Hatta Rahman dalam dunia politik hanya menanggapi dengan kepala dingin. Alhasil dia terpilih kembali menjadi bupati periode 2016-2021. Oleh karena itu dapat kita lihat bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Maros sudah mulai sadar akan politik, karena kasus yang menimpah Hatta Rahman tidak mempengaruhi eksistensinya di mata masyarakat terbukti dia mampu menang telak dari lawan-lawannya jumlah perolehan suaranya 106.942 atau 67,64% dari total suara

yang sah. Jika kita melihat perolehan suara yang terdapat pada pilkada serentak kali ini yang ada di sul-sel berarti Hatta Rahman merupakan peringkat pertama dari ke tiga puluh lima pasangan yang bertarung pada pilkada di sul-sel.

Dalam melihat konstalasi pilkada di Kabupaten Maros yang lalu di lakukan secara langsung sangat melihat bagaimana orang orang antusias dan bersuka cita untuk menyambut pemimpin yang baru, tapi perlu di ingat bahwa pemimpin yang bagus haruslah dari kalangan orang islam apalagi dalam ruang lingkup daerah sul-sel itu sendiri mayoritas beragama islam yang sangat kental dengan budaya-budaya kekeluargaan dan keterunan yang meyakini bahwa memilih seorang pemimpin itu sangatlah bagus jika ada kesamaan baik itu dari segi agama maupun suku, seperti dalam salah satu firman Allah swt. pada Q.S. Al-Imran Ayat 28 sebagai berikut:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ  
ثِقَةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pemimpin) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah swt. memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah swt. kembali (mu).”<sup>13</sup>*

Dari firman Allah swt. diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan persamaan keyakinan merupakan hal yang mutlak untuk di jadikan panutan apalagi dengan mayoritas masyarakat daerah sul-sel hampir islam sepenuhnya.

---

<sup>13</sup>Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami'al-Bayan Fi Ta'Wil al-Qur'an*, Juz. 6, Cet. I (Beirut : Mu'Assisah al-Risalah, 2000), h. 313

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015.

### **2. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberi kontribusi bagi pengembangan Ilmu politik khususnya kajian seputar *kekuatan kekuatan politik birokrasi* yang terjadi di ranah lokal agar fenomena yang ditemukan oleh peneliti terus dikembangkan sehingga dapat memajukan kehidupan berdemokrasi kearah yang lebih baik.

#### **a. Manfaat Praktis**

##### **1) Bagi Jurusan**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, jurusan dapat mengeksplorasi kajian tentang kekuatan-kekuatan politik birokrasi khususnya dalam materi perkuliahan dan diskusi/dialog serta seminar yang dilaksanakan oleh jurusan.

##### **2) Bagi Pembaca**

Agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian serta studi kasus bagi pembaca dalam melihat demokrasi pada ranah lokal dan diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsi bagi masyarakat bangsa dan negara.

##### **3) Bagi Elit/Politisi**

Diharapkan dapat bermanfaat terhadap politisi sebagai acuan dalam melihat pelaksanaan Pilkada dalam mencapai tujuan dan membangun relasi yang baik serta mengkonversikan modal yang dimiliki sehingga dapat memberikan pengaruh dalam kontestasi yang akan diikuti.

#### **D. Tinjauan Karya Terdahulu**

Berikut adalah matriks tabel beberapa karya terdahulu dalam penelitian ini, antara lain:

<b>No</b>	<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Dian Rhesa Rahmayanti	<i>“Pemasaran Politik (Political Marketing) Partai Golongan Karya Dan Partai Demokrat.(Studi Tentang Perbandingan Pemasaran</i>	Penelitian ini menggunakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi.	Penelitian ini menjelaskan proses pemasaran politik Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam rangka menarik massa pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 di Daerah pilihan II Kabupaten Madiun. Penelitian ini juga menjelaskan media-media pemasaran politik yang dilakukan kedua partai

		<i>Politik Partai Golkar Dan Partai Demokrat Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pilihan II Kabupaten Madiun)</i>		tersebut dan aplikasi secara nyatanya dilapangan. <sup>14</sup>
2	Hartini Basaria Natasya Sitanggang	<i>“Strategi Marketing Hary Tanoesoedibjo dalam Usaha Membangun Personal</i>	Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).	Penelitian ini menjelaskan bahwa kekuatan media baru sebagai sumber informasi politik, tidak lepas dari perkembangannya sudah menjadi media <i>mainsream</i>

<sup>14</sup>Dian Rhesa Rahmayanti, “Pemasaran Politik (Political Marketing) Partai Golongan Karya Dan Partai Demokrat. (Studi Tentang Perbandingan Pemasaran Politik Partai Golkar Dan Partai Demokrat Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pilihan II Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009), h. xvi.

		<p><i>Branding Politik</i></p>	<p>Kemudian dilakukan penelitian lapangan (<i>field research</i>) untuk melakukan pengamatan dan observasi langsung di lokasi penelitian. Berikutnya, pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam (<i>indepth interview</i>).</p>	<p>yang membangun interaktivitas bagi sesama penggunanya. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh konsultan politik untuk mempromosikan partai politik atau kandidat perseorangan. Hary Tanoesoedibjo, sebagai salah satu pebisnis media yang memasuki jalan sebagai politisi. Dalam menaikkan popularitasnya di dunia politik, konsultan politik yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibjo berusaha menerapkan strategi marketing politik, karena mengingat Partai Indonesia Raya (Perindo) dan Hary Tanoesoedibjo sendiri terbilang baru dalam panggung politik nasional. Studi ini dibuat untuk</p>
--	--	--------------------------------	---	--

				mengetahui bagaimana strategi marketing politik dari tim Hary Tanoesoedibjo. <sup>15</sup>
3	Ajeng Niadharma	<i>“Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik Tahun 2015”</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.	Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran politik pasangan Sambari-Qosim dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik 2015. Tingkat elektabilitas pasangan Sambari dan Qosim yang masih tinggi serta soliditas antar keduanya yang tidak pecah dalam Pilkada 2015 membuat bentuk pemasaran politik yang dilakukan memiliki kemudahan untuk meraih suara terbanyak pada Pemilihan Kepala Daerah Gresik tahun 2015. <sup>16</sup>

<sup>15</sup> Hartini Basaria Natasya Sitanggang dan Awang Dharmawan, “Strategi Marketing Hary Tanoesoedibjo dalam Usaha Membangun Personal Branding Politik”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 20 No.1 Juni 2016, h. 49-62.

<sup>16</sup> Ajeng Niadharma, “Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik Tahun 2015”, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, Nomor 3, Agustus –Desember 2016, h. 369 -374.



4	Umaimah Wahid	“ <i>Personal Branding dan Retorika Komunikator Politik Pada Pemilukada DKI Jakarta 2017 (Analisis Retorika Atas Teks Pidato Sebagai Kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Penentuan Nomor Urut Peserta Pemilu)</i> ”	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( <i>laws in book</i> ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas	Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif dan metode analisis retorika. <i>Personal branding</i> dipandang sangat penting dibentuk sejak awal (dini) oleh komunikator politik khususnya politisi yang ikut pilkada mampu mengdongkrak popularitas dan kepercayaan publik. Teks pidato pada agenda penentuan nomor urut nyatanya dipergunakan secara maksimal oleh calon kandidat terutama pasangan Agus Yudhoyono-Silviana Murni sebagai pasangan yang cenderung diragukan.. <sup>17</sup>
---	---------------	---	--	--

<sup>17</sup>Umaimah Wahid “*Personal Branding dan Retorika Komunikator Politik Pada Pemilukada DKI Jakarta 2017 (Analisis Retorika Atas Teks Pidato Sebagai Kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Penentuan Nomor Urut Peserta Pemilu)*”, *Prosiding Seminar Nasional : Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal*, ISBN: 978-602-60465-0-5, h. 1-19.

			dengan pendekatan perundang-undangan.	
5	Ayub Liwang	“Kekuatan dan Stretegi Politik Dalam Pemilukada, Analisis Kemenangan Adnan Puricta dalam Pilkada Kab. Gowa tahun 2015”	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.	Kekuatan politik merupakan aktor politik maupun lembaga-lembaga yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa kekuatan politik yang mendukung kemenangan Adnan Purichta–Karaeng Kio dalam pemilihan Bupati Kabupaten Gowa tahun 2015 adalah Klan Politik, Partai Politik, Birokrasi dan Media Massa. <sup>18</sup>

<sup>18</sup> Ayub Liwang, Kekuatan dan Stretegi Politik Dalam Pemilukada, Analisis Kemenangan Adnan Puricta dalam Pilkada Kab. Gowa tahun 2015, Skripsi UIN Alauddin, 2015

6	Muh. Irfan	Kekuatan Politik Birokrasi (Studi Terhadap Kemenagan Incumbent Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015)	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Hatta Rahman mempunyai penguasaan ruang politik yang lebih luas dalam mengimplementasikan strategi kampanyenya, sebagai calon Bupati <i>incumbent</i> . Ia memiliki keuntungan tersendiri, akses untuk mempengaruhi para birokrasi sangat terbuka lebar di tambah dengan berbagai kebijakan yang pernah dikeluarkan pada waktu menjabat sebagai Bupati Maros pada periode 2010-2015. Pengalaman organisasi dengan posisi yang strategis, yaitu pernah menjadi ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Ketua Kharisma Kawula Muda Maros (KKMM), menjadi senjata ampuh untuk
---	------------	---	--	---

				Hatta Rahman dalam kontestasi politik. Selain itu Hatta Rahman memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elit dan masyarakat lokal hal tersebut menjadi modal sosial Hatta Rahman.
--	--	--	--	--

Tinjauan pustaka ini tentunya menjadi pembanding dalam penelitian juga dapat mempermudah alur penelitian karena dapat menjadi referensi tambahan guna memperkuat relasi argumentasi dalam penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Komunikasi Politik**

Dari sudut penelitian, komunikasi politik telah mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di Amerika maupun di Eropa Barat. Begitu pula dalam pembedangannya, komunikasi politik telah membagi kajian-kajian dalam bidang unsur-unsurnya, apakah itu komunikator politik, pesan politik, media komunikasi politik, khalayak politik, sampai pada metode analisis. Cukup banyak pernyataan para ahli yang menunjukkan kedekatan komunikasi dengan politik. Sebagaimana ditulis Nasution (1990) dengan mengambil pendapat dari Galnoor (1980) misalnya, mengatakan bahwa “tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik.” Pernyataan lain datang dari Pye (1963), bahwa: “tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (*enlarging*) dan melipatgandakan (*magnifying*) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.” Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Menurut Maran proses ini terjadi secara berkesinambungan dan mencakup pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Mohammad Zamroni, “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender”, *Jurnal Dakwah*, vol. XIV, no. 1, 2013, h. 110-111

Komunikasi politik menjadi penting karena merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik, komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik yang terjadi di lingkungan yang bersangkutan. Dalam hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik. Komunikasi politik dalam perkembangannya harus dapat menjelaskan proses komunikasi yang telah dirumuskan oleh Lasswell (1948), lebih khususnya lagi disiplin ilmu komunikasi politik dari berbagai pengkajian literatur secara periodik, buku-buku, dan literatur yang populer diarahkan kepada: 1). *Political communicator*, 2). *Political message*, 3). *The media of political communication*, 4). *The political audience*, 5). *Methods in the study of political*. Dengan demikian, adanya pembidangan pembahasan komunikasi politik, sepatutnya juga pengkajian dan penelitian diarahkan pada arah tersebut, sehingga dalam perkembangan yang dinamis tidak terlepas dari kerangka proses komunikasi.<sup>20</sup>

Pada hakikatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Penegasan A. Muis tentang komunikasi politik ini adalah menandakan bahwa simbol-simbol politik akan bermakna apabila dilihat dari interpretasi makna yang dihasilkan melalui proses komunikasi. Jadi titik pandang dari interaksi simbol-simbol politik mengalami proses makna yang dikandung dalam simbol tersebut. Proses makna tersebut hanya bisa diartikan apabila kita dapat merumuskannya dalam batasan komunikasi politik. Ini pula sesungguhnya yang terjadi pada konsep komunikasi politik dalam kajian ilmu politik yang memberikan batasan ilmu

---

<sup>20</sup>Mohammad Zamroni, "Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender", *Jurnal Dakwah*, vol. XIV, no. 1, 2013, h. 111-112

komunikasi politik. Di antaranya ilmuwan politik Gabriel Almond, mengungkapkan bahwa komunikasi politik telah dikategorikan sebagai satu dari empat fungsi *input* dalam sistem politik. Lebih lanjut mereka memakai pendekatan komunikasi politik sebagai penyebab bekerjanya semua fungsi dalam sistem politik. Dari sudut pandang Almond, tentunya bisa dipahami bahwa komunikasi politik dilihatnya sebagai penghubung antara satu fungsi dengan fungsi *input* dalam sistem politik dan hasil dari melaksanakan fungsi tersebut menghasilkan *output*, dan mereka juga melihatnya untuk bekerjanya suatu sistem khususnya dalam kriteria *input function* dibutuhkan berfungsinya komunikasi. Lebih lanjut, Almond menganalisis komunikasi politik dititik beratkan pada saluran (medium) dalam merumuskan komunikasi politik dan tentunya proses input-output dilihat daripendekatan sistem, sehingga dalam ilustrasi dan contoh yang diberikan mereka mengibaratkan komunikasi politik dilihatnya dari sirkulasi darah yang mengalir dalam tubuh manusia.<sup>21</sup>

Konsep komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi seorang kandida tatau kebijaksanaan politik. Begitu juga konsep komunikasi politik yang ditawarkan Dan Nimmo dalam bukunya *Political Communication and Public Opinion in America* (1978), ia melihat politik, seperti komunikasi yaitu sebagai suatu proses, dan seperti komunikasi yaitusebagai politik yang melibatkan pembicaraan. Lebih jauh Nimmo menekankan bahwa komunikasi politik bukan saja pembicaraan dalam arti sempit seperti kata-kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang inklusif, yang meliputi segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang ditulis dan diucapkan, gambar, gerakan,

---

<sup>21</sup>Mohammad Zamroni, "Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender", *Jurnal Dakwah*, vol. XIV, no. 1, 2013, h. 113-114.

sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Dari uraian Nimmo, makna konsep yang dapat kita tangkap, bahwa komunikasi politik berusaha menempatkan (*setting*) maknanya sebagai proses komunikasi yang terjadi pada setiap interaksi politik. Dan tentunya pula, Nimmo berusaha menggambarkan secara inklusif bahwa adanya makna interaksi yang bermuatan politik pada akhirnya berawal dan berakhir dengan adanya proses komunikasi.<sup>22</sup>

## 2. Teori Strategi Politik

Strategi politik merupakan strategi yang di gunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau di jalankanya tindakan deregulasi privatisasi atau desentralisasi. Pengalaman membuktikan bahwa tindakan semacam itu biasanya tidak di rekanakan secara cukup matang, baik oleh partai politik maupun pemerintah. Jika tidak demikian halnya, tidak mungkin ada begitu banyak proyek yang gagal. Dalam praktanya, hasil dari tindakan dan dan “perencanaan” yang demikian mengakibatkan pihak yang terkait pertama-pertama berusaha untuk memberikan perlawanan, dan kemudian tidak menaati peraturan, atau bahkan sama sekali tidak mengakui peraturan itu. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat, bahwa pemerintah terlalu lemah untuk mewujudkan peraturan tersebut.

Pentingnya strategi politik bukan hanya tampak pada partai politik dan pemerintah, namun juga pada organisasi non-pemerintah (*Non Government Organisation/NGO*) yang turut berperan dalam politik. Baik serikat, kelompok

---

<sup>22</sup> Mohammad Zamroni, “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender”, *Jurnal Dakwah*, vol. XIV, no. 1, 2013, h. 114.



lingkungan hidup, organisasi HAM dsb. Semuanya membutuhkan strategi untuk mewujudkan rencana jangka panjangnya.<sup>23</sup>

Dalam memilih strategi, pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar kita dapat menetapkan pilihan yang tepat. Dalam setiap pola, ada sederetan strategi tunggal, dimana pilihan khusus mengenai kerangka persyaratan tergantung pada citra yang diinginkan dan tujuan-tujuan organisasi. Pada dasarnya strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensive (bertahan). Strategi ofensif menjadi strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar. Strategi defensive menyangkut strategi untuk memperthankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar.<sup>24</sup>

### 3. Teori Birokrasi

Era reformasi yang dimulai pada bulan Mei 1998 membuat birokrasi menjadi lebih menarik untuk dibicarakan. Hal ini lantaran reformasi menuntut kehidupan politik yang terbuka, transparan, dan diterapkannya nilai-nilai pokok demokrasi seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM), kebebasan, persamaan, keadilan, dan pertanggungjawaban Sementara itu, birokrasi selama ini diindikasikan sebagai penghalang bagi tegaknya demokrasi karena lebih menjadi alat kekuasaan rezim daripada melayani rakyat secara memuaskan. Dengan demikian, dapat dikatakan menjadi dilema bagi demokrasi. Persoalan mendasar birokrasi di Indonesia pada era reformasi sekarang ini ialah bagaimana membenahi birokrasi agar responsif, selaras, dan seirama dengan nilai-nilai pokok demokrasi yang kini telah menjadi wacana dan tuntutan publik. Apalagi dihadapkan pada pemberlakuan otonomi daerah

---

<sup>23</sup>Peter Schrode, *Strategi Politik* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004), h. 7-8

<sup>24</sup>Peter Schrode, *Strategi Politik*, h. 104

sejak bulan Januari 2001 dengan diterapkannya UU No. 22/1999 mengenai pemerintah daerah dan UU No. 23/1999 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah birokrasi mutlak perlu dilakukan pembenahan. Tulisan ini ingin mengelaborasi persoalan di atas. Tetapi sebelumnya akan dikaji mengenai birokrasi dari perspektif teoritik agar permasalahan menjadi lebih jelas. Selain itu, pengalaman empirik birokrasi di Indonesia secara historis juga akan memperkaya pemahaman tentang birokrasi, sekaligus menjadi patokan dalam membenahi birokrasi agar relevan dengan era reformasi yang menuntut kehidupan politik yang lebih demokratis.<sup>25</sup>

Dewasa ini birokrasi kerap diartikan sebagai lembaga atau institusi yang melaksanakan fungsi-fungsi, dan tanggung jawab negara. Dengan kata lain, birokrasi merupakan kamar mesin (the engine-room)nya negara. Birokrasi juga sering diartikan sebagai organisasi para pejabat yang tersusun secara hirarkis dan diangkat untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik tertentu. Berbagai variasi anti birokrasi yang berkembang saat ini, sekurang-kurangnya-mengutip dapat dirangkum menjadi tujuh pengertian, yaitu: (1) birokrasi sebagai organisasi yang rasional,(2) birokrasi sebagai lisensi organisasional,(3) birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat,(4) birokrasi sebagai administrasi negara atau publik,(5) birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh para pejabat,(6) birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki ciri-ciri dan kualitas tertentu, dan(7) birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern.<sup>26</sup>

Birokrasi mampu membangun jaringan kekuasaan yang lebih besar dan luas daripada yang dibuat oleh kekuatan non- birokrasi, misalnya politisi, karena birokrasi

---

<sup>25</sup>Suwarno, "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008, h. 254

<sup>26</sup>Suwarno, "Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik", h. 255.

mempunyai sumber daya politik atau kekuasaan yang relatif lebih besar dibanding kekuatan non-birokrasi. Kenyataan yang semacam ini adalah akibat dari ketidakmampuan politik kekuatan non-birokrasi dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap birokrasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di banyak negara berkembang atau Dunia Ketiga, terutama yang dikuasai oleh rezim otoritarian seperti halnya Indonesia di bawah Orde Baru, birokrasi memiliki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan politik, khususnya dalam hal pengambilan keputusan (decision making).<sup>27</sup>

Model birokrasi dari Weber merupakan salah satu model yang ideal dan sesuai untuk merancang teori-teori mengenai organisasi-organisasi. Makna birokrasi disini adalah banyak menyerupai konsep kompetisi sempurna (perfect competition) dalam teori ekonomi mengilhami Weber dalam merancang birokrasinya. Struktur adalah suatu model yang sederhana dan merupakan suatu patokan untuk mengukur suatu kenyataan. Ini merupakan kesamaan dengan idealisasi birokrasi yang di kemukakan Max Weber tersebut. Teori birokrasi dari sosiolog terkemuka Weber di percaya oleh sebagian besar ahli politik sebagai salah satu teori birokrasi utama yang berpengaruh terhadap pembentukan semua organ birokrasi di hampir setiap negara pada saat ini. Gagasan-gagasan tentang birokrasi rasional dianut oleh hampir sebagian besar pemerintahan, baik yang demokratis maupun otoriter.<sup>28</sup>

Weber memandang bahwa fenomena birokrasi dapat di lihat dalam konteks “teori sosial action” menurut dia semua aktivitas manusia pada dasarnya di gerakkan oleh maksud-maksud tertentu (meanings). Agar supaya kita bisa memahami dan

---

<sup>27</sup> Suwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik”, *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008, h. 256.

<sup>28</sup> Zainuddin Mustafa, *Bunga Rampai Birokrasi* (Makassar: Celebes Media Perkasa 2017), h. 2.

menjelaskan suatu aksi atau aktivitas, maka maksud dan motivasi yang ada di belakang aktifitas itu harus pula di mengerti.<sup>29</sup>

Secara teori, suatu birokrasi mempunyai berbagai sifat yang dapat di bedakan dari ketentuan-ketentuan lain dari suatu organisasi. Beberapa sifat yang amat penting dapat di kemukakan sebagai berikut.

1. adanya spesialisasi, atau pembagian kerja
2. adanya hirarki yang berkembang
3. adanya suatu sistem dari suatu prosedur dan aturan-aturan
4. adanya hubungan-hubungan kelompok yang bersifat impersonalitas.
5. adanya promosi dan jabatan yang berdasarakan atas kecakapan.

Aspek-aspek perilaku yang di cerminkan dari birokrasi weber dapat di lihat dari penekanan weber pada struktur yang di timbulkan dari rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu, mendapatkan informasi yang baik, dan membuat keputusan yang obyektif, premis perilakunya yang Nampak adalah bahwa seseorang itu membutuhkan bantuan untuk sampai kepada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Struktur adalah jawabanya. Dengan cara spesialisasi prosuder aturan-aturan, maka keputusan akan dibuat secara konsisten dan sistematis.<sup>30</sup>

Selama tiga abad, sejak abad kedelapan belas hingga abad kedua puluh, birokrasi di percaya menjadi satu-satunya oraganisasi yang bisa mengatur mekanisme pemerintahan dengan efesien. Bahkan sistem politik diberbagai negara identik dengan birokrasi. Terutama negara-negara yang menganut ideologi sosialisme, atau

---

<sup>29</sup>Zainuddin Mustafa, *Bunga Rampai Birokrasi* (Makassar: Celebes Media Perkasa 2017), h. 2.

<sup>30</sup>Zainuddin Mustafa, *Bunga Rampai Birokrasi*, h. 3.

kelompok negara yang sering disebut sebagai blok timur, kelompok yang kini telah “almarhum” bisa jadi keruntuhan jerman timur yang disusul seluruh blok timur menjadi sinyal paling kuat bahwa kepercayaan akan birokrasi menjadi lentur. Karena birokrasi yang diidealkan oleh weber ternyata berubah menjadi sebuah monster yang kejam. Istilah birokrasi identik dengan cara kerja sama dengan cara kerja aparatur pemerintah. Artinya, cara kerja aparat pemerintah sendiri sudah di nilai tidak bekerja sebagaimana mestinya. mereka bukan menjadi pelayan masyarakat. Tetapi menjadi ”kekuasaan” yang harus di layani oleh masyarakat.<sup>31</sup>

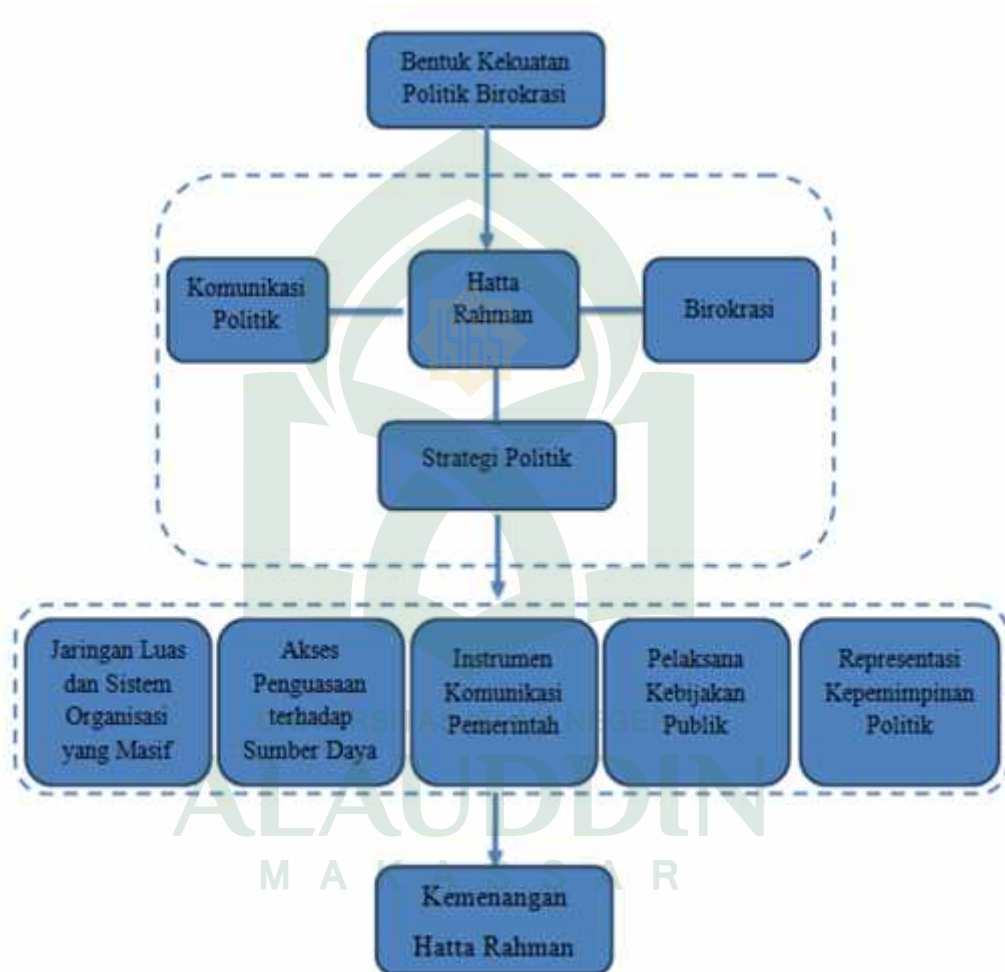
Birokrasi yang di bayangkan weber sebagai organisasi kemasyarakatan yang superior karena ketepatan, kecepatan dan pengatuhan tentang kerasipan dan kontinuitas, penyimpangan, kesatuan subordinasi yang ketat, pengurangan friksi dan biaya material serta personal sulit di temukan dan di praktekkan, karena dua alasan: Birokrasi pada akhirnya harus kawin-kawin dengan budaya setempat yang tidak jarang merupakan revitalitas budaya aristokrasi, entah itu di negara maju maupun di negara berkembang. Tidak heran, karena aristokrasi tetap merupakan “iming-iming” paling menarik bagi setiap manusia. Karena dalam kultur tersebut ia paling mungkin untuk menjadi the ultimate goal. Kedua pada giliranya birokrasi bukan hanya menjadi struktur organisasi sebagai lawan dari organisasi sukarela, ataupun organisasi aristokrasi yang di gantikanya melainkan ia menjadi sebuah zat yang “berkuasa“, karena mereka bukan hanya “organisasi keamanan “ tetapi organisasi yang berisi personel yang memegang (monopoli) senjata (pembunuh).” Kekuasaan “ yang di berikan oleh masyarakat kepada birokrasi menjadi bumerang. Karena ada Satu hal

---

<sup>31</sup>Zainuddin Mustafa, *Bunga Rampai Birokrasi* (Makassar: Celebes Media Perkasa 2017), h. 6.

yang di lupakan, bahwa sebagai sistem birokrasi pun perlu untuk mengalami self renewal.<sup>32</sup>

### ***B. Kerangka Konseptual***



<sup>32</sup>Zainuddin Mustafa, *Bunga Rampai Birokrasi* (Makassar: Celebes Media Perkasa 2017), h. 7.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana lebih menekankan pada tiga aspek penting, *pertama*, pada unit analisis mikro di mana satuan yang diteliti dibatasi sedemikian rupa sehingga lebih dapat dijelaskan secara terperinci; *kedua*, penelitian bersifat holistik dalam arti melihat obyek yang diteliti secara menyeluruh di dalam satu kesatuan. Suatu fenomena disini dilihat sebagai suatu keseluruhan (*wholeness*) dari sebuah proses sosial budaya; *ketiga*, penelitian kualitatif cenderung menekankan perbandingan sebagai salah satu kekuatan karena perbandingan ini juga yang membuat penelitian kualitatif dapat menekankan proses dan dapat menegaskan konteks sosial dimana suatu gejala itu muncul.<sup>33</sup>

Pendekatan penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal* (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 13.

<sup>34</sup>Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, h. 19.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Maros. Adapun waktu pengambilan data penelitian dilaksanakan selama bulan Desember-Maret 2018.

### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kekuatan politik birokrasi terhadap kemenangan *incumbent* Hatta Rahman dengan mendeskripsikan bentuk kekuatan yang mendukung secara signifikan kemenangan Hatta Rahman di Pilkada Kab. Maros tahun 2015. Beberapa analisis yang dilakukan adalah dengan menjelaskan jaringan politik Hatta Rahman, bentuk kekuatan birokrasi, kekuatan partai pendukung.

### C. Jenis Data

Adapun Jenis data penelitian ini adalah:

1. **Data primer** (*primary data*), yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
2. **Data Sekunder** (*secondary data*), yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.<sup>36</sup> Data sekunder dalam penelitian ini di dapatkan dari situs-situs yang dapat dijadikan suatu referensi berdasarkan

---

<sup>35</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 29-30.

<sup>36</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, h. 138.



kajian penelitian ini, dan juga dari referensi buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.<sup>37</sup> Oleh karena itu metode observasi ini peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

##### **2. Wawancara**

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan oleh penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.<sup>38</sup> Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data yang sesuai.

---

<sup>37</sup>Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 173.

<sup>38</sup>Syamsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal* (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 57.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, dokumen rapat atau catatan harian.<sup>39</sup> Metode ini dipergunakan dalam rangka mencari referensi tambahan dan menguatkan hasil kajian penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Pada penelitian kualitatif, permasalahan di awal penelitian belum jelas dan pasti, maka instrumen yang paling tepat adalah peneliti itu sendiri dan setelah masalah mulai jelas, maka dapat dikembangkan sebagai instrumen yang sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara.<sup>40</sup> Meskipun peneliti sendiri sebagai instrumen utama tetapi dalam penelitian ini alat bantu sangat diperlukan sebagai panduan penelitian, misalnya pedoman wawancara, buku catatan peneliti, *handpone* sebagai alat perekam sehingga diperoleh data yang objektif.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data***

Adapun teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Reduksi data (*data reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu

---

<sup>39</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 131.

<sup>40</sup>Syamsuddin, dkk., *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal* (Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015), h. 54.

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.<sup>41</sup> Reduksi data dalam penelitian ini yaitu memilah-milah jawaban-jawaban hasil wawancara dari Informan karena tidak semua hasil uraian informan dapat ditarik menjadi suatu jawaban dalam penelitian ini.

## **2. Penyajian data (*data display*)**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Dalam kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan men-*display*-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>42</sup>

## **3. Menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)**

Langkah ketiga analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 247.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 249.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, h. 252.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian***

Gambaran umum lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas dan mengenal objek penelitian. Sehubungan dengan itu, maka pada bab ini diuraikan beberapa hal yang memiliki relevans dengan lokasi penelitian.

##### **1. Sejarah Kabupaten Maros**

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah sebuah kerajaan yg cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas kerajaan Siang), bagian timur berbatsan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar).<sup>44</sup>

Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I mallombassi dg mattawang karaeng bonto mangngape' Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kealahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yang dinamakan "Cappaya Ri Bungaya" atau perjanjian bungaya ".yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan" bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh

---

<sup>44</sup>[www.maroskab.bps.go.id](http://www.maroskab.bps.go.id), Diakses pada tanggal -22 januari 2018

kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan “.. Oleh karena itu, kerajaan marusu yg merupakan sekutu kerajaan Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh kompeni belanda. Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng Marusu VII. Saat itu kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen telah menjadi daerah jajahan kompeni Belanda dalam bentuk ” *regentschap*” dimana raja Marusu hanyalah merupakan raja tanpa mahkota (*onttrondevorsteen*) Pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari pihak belanda. Selain itu, wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti: kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau’. Melihat keadaan yg demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La mamma dg marewa diwettae mattinroe ri samanggi yg merupakan keturunan dari I maemuna dala marusu adik kandung dari karaengta barasa sultan Muhammad Ali raja marusu VI ayahanda beliau yg diperisterikan oleh La patau matanna tikka sultan Alimuddin Idris raja bone mattinroe ri nagauleng.<sup>45</sup>

Di masa pemerintahan La Mamma Dg Marewa ini, semua raja kerajaan tetangga yg baru berdiri itu membentuk suatu wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan/ intervensi dari pihak pihak lain terutama dari pihak belanda. Pada awalnya ajakan dari La mamma dg marewa ini ,ditolak karena menganggap rencana La mamma hanya untuk menguasai kembali wilayah kerajaan Marusu yang sudah terpecah pecah itu. Namun,berkat diplomasi yg baik .akhirnya terbentuklah suatu

---

<sup>45</sup>[www.maroskab.bps.go.id](http://www.maroskab.bps.go.id), Diakses pada tanggal 22 januari 2018.

wadah persatuan yg bernama ”*Toddo Limayya Ri Marusu* ” (persatuan adat lima kerajaan). Terdiri atas; Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale, dan Raya. Pada masa kemerdekaan yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang didalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik.<sup>46</sup>

## **2. Letak Geografi Kabupaten Maros**

Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,11 km yang terdiri dari 14 kecamatan yang membawahi 103 Desa/Kelurahan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros.

Kabupaten Maros secara geografis terletak dibagian Barat Provinsi Sulawesi Selatannya itu pada 40°45’ hingga 50°07’ Lintang Selatan dan 109°20’ hingga 129°12’ Bujur Timur Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12km<sup>2</sup> atau 2.3% dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas, yaitu:

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep
- Sebelah Selatan adalah Kota Makassar
- Sebelah Timur adalah Kabupaten Bone

---

<sup>46</sup>[www.maroskab.bps.go.id](http://www.maroskab.bps.go.id), Diakses pada tanggal -22 januari 2018

- Sebelah Barat adalah Selat Makassar .

### **3. Data Kependudukan Dan Ketanakerjaan di Kabupaten Maros**

#### **a. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 319.008 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 43.378 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 342.890 jiwa.

Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Namun di Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.462 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 48 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>47</sup>

#### **b. Ketenagakerjaan**

Penduduk Usia Kerja (PUK) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja di Kabupaten Maros pada tahun 2015 berjumlah 155.988 jiwa. Dari seluruh penduduk tersebut, yang masuk menjadi

---

<sup>47</sup> [www.maroskab.bps.go.id/frontend/](http://www.maroskab.bps.go.id/frontend/), Diakses pada tanggal -22 januari 2018

pengangguran berjumlah 10.907 jiwa. Dari seluruh penduduk angkatan kerja di Kabupaten Maros, terdapat 145.081 jiwa penduduk yang sedang bekerja.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros, 2010, 2014 , dan 2015

Kecamatan Subdistrict		Jumlah Penduduk (ribu) Population (thousand)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
		2010	2014	2015	2010- 2015	2014- 2015
	-1	-2	-3	-4	-5	-6
1	Mandai	35.343	37.617	38.224	1,58	1,61
2	Moncongloe	17.083	18.183	18.476	1,58	1,61
3	Maros Baru	24.086	25.303	25.599	1,23	1,17
4	Marusu	25.298	26.476	26.752	1,12	1,04
5	Turikale	41.430	43.335	43.778	1,11	1,02
6	Lau	24.301	25.529	25.827	0,95	1,17
7	Bontoa	26.593	27.655	27.884	0,95	0,83
8	Bantimurung	28.115	29.288	29.548	1	0,89
9	Simbang	22.248	23.204	23.419	1,03	0,93
10	Tanralili	24.506	25.582	25.828	1,06	0,96
11	Tompobulu	14.158	14.858	15.027	1,2	1,14
12	Camba	12.562	13.057	13.164	0,94	0,82
13	Cenrana	13.634	14.276	14.428	1,14	1,06
14	Mallawa	10.746	11.233	11.346	1,09	1,01
Maros		320.103	335.596	339.300	1,17	1,1

Sumber: BPS Kab. Maros 2017



#### 4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Maros

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu aspek penggunaan sumber daya ekonomi yang secara langsung dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah dan secara tak langsung dimiliki oleh masyarakat melalui pembayaran pajak. Realisasi pengeluaran rutin Pemerintah Kabupaten Maros pada Tahun 2016 sebesar Rp. 1 339 212 825 ribu. Dan Realisasi Penerimaan daerah sebesar Rp. 1 374 103 118 ribu. Sulawesi Selatan merupakan daerah penghasil tanaman pangan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Predikat sebagai lumbung padi nasional mengukuhkan posisi Sulawesi Selatan sebagai produsen tanaman pangan yang cukup potensial. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya yang dihasilkan Sulawesi Selatan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Produksi padi Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 448.894,26 ton yang dipanen dari areal seluas 60.408 ha atau rata-rata 7,4 ton per hektar.<sup>48</sup>

Sebagian besar produksi padi di Kabupaten Maros dihasilkan oleh jenis padi sawah. Jenis padi ini menyumbang 97,29 persen dari seluruh produksi padi atau sebesar 436.790,26 ton. Sedangkan 2,71 persen dihasilkan oleh padi ladang. Produksi Jagung Kab. Maros pada tahun 2016 sebesar 69.402,27 ton dengan luas panen 9.858 ha.

##### a. Tanaman Perkebunan dan Kehutanan

Hasil tanaman perkebunan yang cukup dominan di Kabupaten Maros pada tahun 2016 adalah tanaman kemiri yang memiliki produksi sebesar 2.099,8 ton. Sebagian besar hasil perkebunan tersebut dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Kawasan hutan di Kabupaten Maros pada tahun 2015 seluas 65.020,24 ha yang antara

---

<sup>48</sup> [www.maroskab.bps.go.id/](http://www.maroskab.bps.go.id/) Diakses pada tanggal -22 januari 2018

lain terdiri dari 14.610,68 ha hutan lindung, 28.610,94 Suaka Alam dan Pelestarian Alam, 15.364,49 ha hutan produksi terbatas, dan 6.434,13 ha hutan produksi tetap.

b. Peternakan dan Perikanan

Peranan sub sektor peternakan dalam bidang pertanian cukup besar menempati posisi kedua terbesar setelah tanaman bahan makanan. Salah satu tujuan di sub sektor ini adalah meningkatkan populasi dan produksi daging dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat. Hal yang pokok tentu saja adalah untuk menghasilkan pendapatan peternak terutama yang berdomisili di pedesaan.

Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Maros berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2016 jumlah ternak yang dipotong sebagai berikut sapi potong sebesar 2.729 ekor, kerbau 70 ekor, kuda 393 ekor, kambing 2.612 ekor. Sedangkan jumlah produksi telur unggas di Kabupaten Maros 732.440 telur dari ayam buras, 5.378.678 telur dari ayam petelur, 2.288.934 telur dari itik dan Pada tahun 2016, total produksi ikan hasil pengangkapan dan budidaya sebesar 28.229,3 ton.<sup>49</sup> Wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek yakni:

1) Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah

---

<sup>49</sup>[www.maroskab.bps.go.id](http://www.maroskab.bps.go.id), Diakses pada tanggal -22 januari 2018

pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.

2) Pusat Penelitian Pertanian yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

3) Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.

4) Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihandan pendidikan Kostrad TNI- AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja, Kecamatan Bantimurung dan Kariango, Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga dijadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

5) Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammamang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammamang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne

Kecamatan Marusu Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara bahkan ada yang berasal dari Malaysia

6) Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama diKTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalamKawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar2.462 Km<sup>2</sup>, wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah1.039 Km<sup>2</sup> atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur penyediaan lapangan kerja penyerapan tenaga kerja PAD dan lain sebagainya.

#### **B. Profil Ir.H.M. Hatta Rahman, Mm.**

Ir. H. M. Hatta Rahman, MM. lahir Maros, 09 September 1966. Hatta Rahman memiliki istri yang bernama Hj. Suraida Hatta. Hatta Rahman saat ini menjabat sebagai bupati Maros yang dipilih secara langsung. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Hatta Rahman pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Amanat Nasional Maros, Tahun 2002 – sekarang, Hatta Rahman merupakan calon *incumbent* pada pilkada Bupati Maros pada tahun 2015 lalu. Pada pilkada Maros tahun 2015 Hatta Rahman berpasangan dengan H. A. Harmil Mattotorang (yang pernah menjabat sebagai kabag keuangan pemkab Maros). Pasangan tersebut diusung oleh koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) ditambah sejumlah partai kecil lainnya. Setelah

menjalani persaingan yang ketat, Hatta Rahman akhirnya memenangi pemilihan Bupati untuk periode keduanya bersama pasangannya, H. A. Harmil Mattotorang. Bupati yang terkenal dengan tagline “*Hatita*” ini ini mulai merealisasikan ide-idenya, antara lain Maros Lebih Sejahtera 2021.

Hatta Rahman mengungkapkan bahwa hal dasar dalam menyejahterakan rakyat dan membuat suatu bangsa maju terletak bagaimana sektor kehidupan bisa terpenuhi dengan baik. Adapun visi Hatta Rahman di jabarkan dalam enam poin misi, yaitu meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pembangunan wilayah dan kawasan, meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi.

#### **Riwayat Pendidikan**

1	SD Muhammadiyah Maros, Tahun 1979
2	SMP Negeri I Maros, Tahun 1982
3	SMA Negeri I Maros, Tahun 1985
4	UNHAS Fakultas Teknik Sipil, Tahun 1990
5	UMI Program Magister Managemen Makassar 2009

#### **Pengalaman Organisasi**

	Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Maros, Tahun 1999 – sekarang
	Ketua DPD Partai Amanat Nasional Maros, Tahun 2002 – sekarang
	Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maros, Tahun 1997

	Wakil Ketua Umum Askumindo Sul-Sel (2003-2006)
	Ketua Bidang Perdagangan Dalam Negeri Kadin Sul-Sel (2009-sekarang)
	Ketua Kharisma Kawula Muda Maros (KKMM)
	Dewan Pertimbangan Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa (HPPMI) Maros
	Pengurus Muhammadiyah Kabupaten Maros (sekarang)

### **Prestasi/Pengalaman Pekerjaan**

	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros (2004-2009 & 2009-2014)
	Koordinator Pembangunan Masjid Almarkas Al Islami Kab.Maros (2002-2004)
	Koordinator Pembangunan Kantor Bupati Kab.Maros (2001-2003)
	Direktur Utama PT. Megah Mustika Mitra Mandiri (1995-2004)
	Direktur CV. Mitra Utama (1993-2004)
	Pengusaha Teladan Kabupaten Maros tahun 2002
	Siswa Teladan Kabupaten Maros tahun 1985
	Alumni terbaik Fakultas Teknik Unhas tahun 1990

Semenjak Kabupaten Maros terbentuk, tercatat 13 bupati yang pernah menjabat sebagai bupati, namun hanya Hatta Rahman yang pernah menjadi Bupati di dua periode yang berbeda yaitu 2010-2015 dan 2016-2021. Hal tersebut menjadi sejarah dalam pemerintahan Kabupaten Maros. Berikut nama-nama Bupati Maros Dari Tahun 1960 sampai sekarang.

Tabel 4.2 Nama Bupati Maros Dari Tahun 1960 sampai sekarang

No	NAMA BUPATI	PERIODE
1.	Nurdin Johan	1960 – 1962
2.	Kol. (purn) Yasin Limpo	1962 – 1962
3.	Drs.M.Nur Tahir	1962 – 1963
4.	Makmur Daeng Sitakka	1963 – 1965
5.	Lekol. H. Kasim Daeng Marala	1965 – 1979
6.	Drs. Malik Hambali	1979 – 1979
7.	Lekol. drg. Kamaruddin Baso	1979 – 1984
8.	Lekol Pol. Drs. H. M. Arief Wangsa	1984 – 1989
9.	Drs. Alwy Rum	1989 – 1994
10.	H. Nasrun Amrullah	1994 – 1999
11	Andi Pamadengrukka Mappanyompa	1999 – 2000 (PLT)
12	Drs. Andi Nadjamuddin Amunullah	2005 – 2010
13.	Ir. H. M. Hatta Rahman. M.M	2010 – 2015
14	Ir. H. Andi Herry Iskandar M.Si	2015 – 2016 (PLT)
15	Ir. H. M. Hatta Rahman. M.M	2016– sekarang

**Sumber:** Kantor Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Maros

Melihat sepak terjang seorang Hatta Rahman dalam ranah politik sudah bisa dikatakan beliau mampu menjadi pemimpin, terbukti dari beberapa organisasi yang digelutinya didukung pengalaman kerja yang sudah tidak di ragukan lagi, dan di balik sosok Hatta Rahman pandangan masyarakat Maros mengatakan bahwa sosok bapak

Hatta Rahman sangat ramah terhadap masyarakat. Hatta Rahman mempunyai modal sosial karena beliau merupakan sosok yang paling dikenal masyarakat lokal sebagai calon Bupati Maros yang pernah menjabat sebelumnya. Terbukti menurut hitungan perolehan suara beliau per kecamatan, Hatta Rahman menang mutlak, berikut tabel hitungan rekapitulasi suara per kecamatan Pilkada Kab. Maros:

Tabel 4.3 Daftar Perolehan Suara Hatta Rahman  
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros

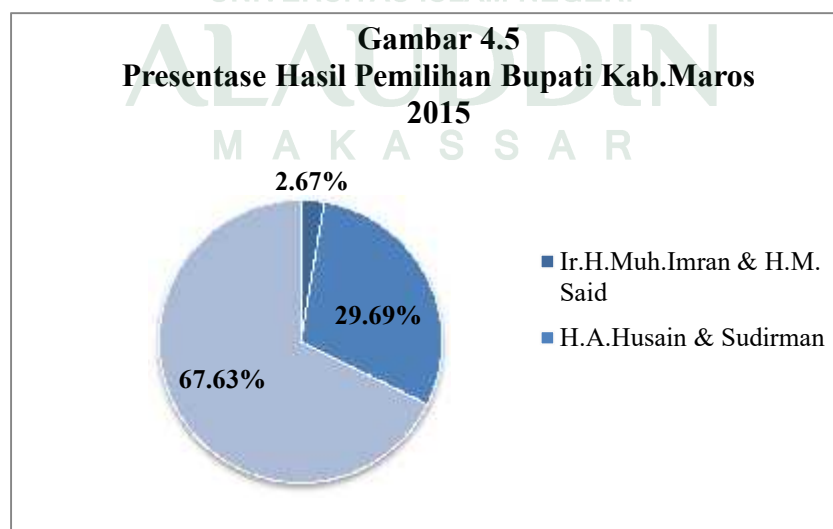
NO	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Perolehan hatta rahman	Suara Sah	Suara tidak Sah	Jumlah Suara
1	bantimurung	23.491	15.213	10.420	15.100	113	15.213
2	bontoa	21.652	13.396	7.898	13.297	99	13.396
3	camba	10.590	7.304	6.243	7.265	39	7.304
4	cenrana	11.812	7.141	5.244	7.073	68	7.141
5	lau	20.099	12.386	6.666	12.272	114	12.386
6	mallawa	9.387	6.148	4.512	6.116	32	6.148
7	mandai	28.737	15.727	11.379	15.625	102	15.727
8	maros baru	19.820	11.598	6.462	11.476	122	11.598
9	marusu	21.883	13.068	8.578	12.947	121	13.068
10	moncongloe	12.929	8.522	6.659	8.409	113	8.522
11	simbang	17.569	11.710	7.496	11.654	56	11.710
12	tanralili	17.537	11.006	8.468	10.935	71	11.006
13	tompobulu	10.910	6.839	4.621	6.793	46	6.839
14	turikale	35.065	19.331	12.656	19.154	177	19.331

Sumber : KPU Kabupaten Maros Tahun 2015



Popularitas yang tinggi menyebabkan Hatta Rahman tak perlu lagi memperkenalkan diri kepada masyarakat Kabupaten Maros. Meskipun demikian, tetap penting untuk melakukan sosialisasi di masyarakat untuk memperbesar tingkat keterpilihannya. Hal tersebut jelas berbeda dengan kandidat yang lain, sebab untuk membuat dirinya dikenal oleh masyarakat, maka kandidat lain dituntut untuk melakukan sosialisasi personal yang besar dan intens. Hatta Rahman juga pernah berkecimpung dalam beberapa organisasi dengan posisi yang strategis, yaitu beliau pernah menjadi ketua HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Ketua Kharisma Kawula Muda Maros (KKMM), dan beberapa organisasi lainnya, sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Maros periode 2010-2015.

Persentase suara yang dimiliki pasangan Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang memiliki persentase tertinggi dibanding kandidat lainnya dengan persentase 67,63% atau 106.942 suara. disusul oleh Husain Rasul dan Sudirman Sirajuddin dengan persentase 29.69% atau 46.945 suara, lalu kandidat H. Muh. Imran yusuf dan Said Patombongi dengan persentase 2.67% atau 4.229 suara.



Sumber : KPU Kabupaten Maros Tahun 2015

Keuntungan sebagai calon *incumbent*, membuka jaringan yang luas bagi Hatta Rahman, Terbukti menurut hitungan suara ketiga calon per kecamatan, Hatta Rahman menang mutlak, hal ini menandakan bahwa kekokohan elektabilitas Hatta Rahman masih sangat baik, berikut tabel hitungan rekapitulasi suara ketiga calon per kecamatan Pilkada Kab. Maros:

Tabel 4.4 Data Suara Tiap Pasangan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	H.MUHAMMAD IMRAN YUSUF, M.M	H.ANDI HUSAIN RASUL, S.H	IR.H.M.HATTA RAHMAN, M.M
		1	2	3
1	Bantimurung	271	4.409	10.420
2	Bontoa	301	5.098	7.898
3	Camba	272	350	6.243
4	Cenrana	110	1.719	5.244
5	Lau	257	5.349	6.666
6	Mallawa	210	1.394	4.512
7	Mandai	574	3.672	11.379
8	Maros baru	320	4.694	6.462
9	Marusu	456	3.913	8.578
10	Moncongloe	210	1.540	6.659
11	Simbang	128	4.030	7.496
12	Tanralili	217	2.250	8.468
13	Tompobulu	122	2.410	4.261
14	Turikale	781	5.717	12.656
	jumlah	4.229	46.946	106.942
	<b>Jumlah Keseluruhan Suara</b>			<b>158.116</b>

Sumber: KPU Kab. Maros 2015

Tingkat presentase yang dominan dari perolehan suara politiknya mengindikasikan nama Hatta Rahman cukup dikenal luas oleh masyarakat di Kab. Maros. Masyarakat mengenal Hatta Rahman sebagai seorang yang pernah berkontribusi untuk kepentingan masyarakat, meskipun kontribusi untuk kepentingan masyarakat tersebut masih dapat diperdebatkan terutama seberapa besar kebijakan dan program yang diimplementasikannya tersebut terhadap perkembangan masyarakat. Faktor lainnya adalah figur Hatta Rahman sebagai seorang calon yang berstatus *incumbent* memiliki sumber daya yang cukup besar, materi, sebagai akumulasi dari kepemimpinannya selama ini. Selain itu Hatta Rahman memiliki jaringan yang cukup luas di kalangan elite dan masyarakat lokal hal tersebut menjadi modal sosial Hatta Rahman. Oleh Karena itu, Hatta Rahman memiliki peluang yang besar untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut.

Peran dari partai pendukung juga merupakan hal yang menunjang kemenangan Hatta rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015, sebab selain sebagai Bupati Maros, Ia juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Amanat Nasional Kab. Maros. Melalui kendaraan politik inilah salah satu hal penunjang kemenangan Hatta Rahman. Selain itu, Harmin Mattorang yang merupakan pasangan wakil Hatta Rahman juga merupakan ketua DPC Nasdem, tentunya hal ini semakin memperkuat gerak politik mereka, sebab keduanya adalah pimpinan partai di Kab. Maros.

Relasi dukungan dari partai politik ini merupakan jalan yang secara besar menyokong kemenangan Hatta Rahman, kekuatan partai politik dalam kontestasi politik tidak bisa di angap remeh sebab pengaruh partai politik masih sangat besar bagi kesuksesan berdemokrasi terlebih pada prosesi kontestasi di ranah politik.

Berikut beberapa partai pendukung pasangan Hatta Rahman dan Harmin Mattorang di kontestasi pilkada Kab. Maros;

Tabel 4.5 Partai Politik Pendukung

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD
1	PAN	9 Kursi
2	PDIP	1 Kursi
3	Nasdem	3 Kursi
4	PKB	1 Kursi
	<b>Jumlah</b>	<b>14 Kursi</b>

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan data Tim Sukses tahun 2015

Dukungan dari partai-partai politik ini memungkinkan bagi Hatta Rahman untuk maju kembali sebagai calon *incumbent*. Sebab secara garis besar bahwa sokongan dukungan kepadanya masih pada taraf yang tinggi. Keadaan ini tentu sangat memungkinkan untuk keterpilihan kembali Hatta Rahman menjadi Bupati Kab. Maros.

Disamping faktor-faktor di atas, faktor lain yang juga tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu kekuatan penting yang turut mendukung kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Maros tahun 2015 ialah keterlibatan jajaran pegawai negeri di Kab. Maros. Struktur birokrasi yang merupakan konstruk kepemimpinan Hatta Rahman membuat mereka harus memilih Hatta Rahman meskipun tidak nampak namun dapat dikatakan bahwa andil birokrasi juga turut memberikan signifikansi suara bagi Hatta Rahman. Selama menjabat periode sebelumnya Hatta Rahman

memang mengarahkan salah satu fokusnya pada penataan yang efektif bagi kerja-kerja birokrasi sehingga menciptakan pelayanan yang baik. Program yang mengarah pada birokrasi ini, kemudian menjadi senjata yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penopang suara dari kalangan birokrasi, terlepas mereka mengamankan posisi mereka.

Kepemimpinan Hatta Rahman dalam proses pemerintahannya dapat dikatakan berhasil menyinkronisasikan efektivitas birokrasi. Oleh karenanya, suara Hatta Rahman juga tergerak dari tatanan birokrasi. Kekuatan birokrasi yang menyokong kemenangan Hatta Rahman dapat dikatakan besar, karena pengaruh kekuasaan Hatta Rahman. Sebab kepemimpinan merupakan variabel yang penting dalam pembangunan lembaga. Kepemimpinan adalah kelompok orang yang aktif terlibat dalam merumuskan doktrin dan program lembaga serta menetapkan dan membina hubungan-hubungan dengan lingkungannya..<sup>50</sup> Berikut wawancara dengan Bpk Andi Syahril yang mengatakan:

*“Di Maros ini, memang bisalah dikatakan baik kalau soal tatanan birokrasinya, karna koordinasi antar instansi sudah tertata, sehingga sinkronisasi kerja-kerja birokrasi dapat berjalan lancar”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa selama kepemimpinan Hatta Rahman memang perbaikan tatanan birokrasi selalu dilakukan. Hal ini yang kemudian menjadi dorongan secara langsung maupun tidak para pegawai memilih Hatta Rahman, meskipun pada dasarnya bahwa alasan kekuasaan

---

<sup>50</sup> Titik Djumiarti, Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), journal Vol 1, Th. 2014,. Hal 9

jugalah yang membuat Hatta Rahman dapat memupuk banyak suara dari kalangan birokrasi.

***C. Bentuk Kekuatan Politik Birokrasi dalam Mendukung Kemenangan Hatta Rahman Pada Pilkada Kab. Maros Tahun 2015***

Istilah birokrasi semula dikemukakan oleh Martin Albrow untuk memberikan atribut terhadap istilah yang dipergunakan oleh seorang physiocrat Perancis Vincent de Gournay yang untuk pertama kalinya memakai istilah birokrasi dalam menguraikan sistem pemerintahan Prusia di tahun 1745.<sup>51</sup> Martin Albrow<sup>52</sup> menawarkan tujuh konsep birokrasi yang meliputi:

1. Birokrasi sebagai organisasi sosial,
2. Birokrasi sebagai inefisiensi organisasi,
3. Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat,
4. Birokrasi sebagai administrasi negara (publik),
5. Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat,
6. Birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan
7. Birokrasi sebagai masyarakat modern.

Birokrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah presiden dan Lembaga-lembaga Non Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, bahkan pada tingkat

---

<sup>51</sup> Thoha dalam Irfan Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014), h. 1.

<sup>52</sup> Martin Albrow dalam Irfan Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014), h. 2

Kelurahan dan Desa. Syukur Abdullah<sup>53</sup> membedakan birokrasi menjadi tiga kategori yang meliputi:

1. Birokrasi pemerintahan umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan, dari tingkat pusat sampai daerah. Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” (*regulative-function*);
2. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang sektor yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah pembangunan (*development function*) atau fungsi adaptasi (*adaptive function*);
3. Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi pemerintahan yang pada hakikatnya merupakan bagian atau berhubungan dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.

Pada saat pemilu dan pilkada Politisasi birokrasi melalui mobilisasi (pengerahan) PNS pada saat pilkada, berarti sekali lagi berbicara tentang netralitas birokrasi. Beberapa upaya untuk menetralkan birokrasi sebenarnya pernah dilakukan. Netralitas birokrasi di era reformasi sudah banyak berkembang. Hal ini bermula ketika eksistensi organisasi KORPRI digugat oleh beberapa pihak, misalnya gugatan yang datang dari UI dan desakan untuk membubarkan KORPRI atau bersikap netral dalam setiap proses politik. Meskipun saat itu masih ada juga beda pendapat tentang keharusan pegawai negeri untuk netral dan tidak menjadi pengurus partai politik atau

---

<sup>53</sup> Syukur Abdullah dalam Irfan Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014), h. 5.

menganggap bahwa berpolitik itu adalah hak azasi setiap manusia. Pada kenyataannya, pendapat kedualah yang masih dilestarikan. Sehingga kenetralan pegawai negeri dalam proses politik jauh panggang dari api.

Salah satu strategi politik yang dilakukan *incumbent* untuk melanggengkan kekuasaannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan birokrasi. Strategi politik dengan memanfaatkan birokrasi merupakan strategi yang cukup efektif untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada. Penguasaan politik jaringan pemerintahan terfokus pada pengkondisian birokrasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Maros. Mengingat Hatta Rahman adalah seorang *incumbent* maka dapat saja memerintahkan bawahannya untuk memilih dirinya, jaringan yang telah dibangun Hatta Rahman dapat memengaruhi birokrasi yang ada di Kabupaten Maros mulai dari tingkat level instansi terbawah sampai teratas untuk memilihnya, sehingga kondisi ini memudahkan Hatta Rahman.

Kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros tahun 2015 tidak dapat dilepaskan dari peran birokrasi. Berikut beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman tersebut.

### **1. Jaringan yang Luas dan Sistem Organisasi yang Masif**

Birokrasi memiliki sistem organisasi yang kuat dan terstruktur. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh birokrasi dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Setiap pegawai dituntut untuk loyal terhadap atasannya sehingga pola-pola patrimonial bekerja cukup kuat dalam sistem birokrasi. Pola-pola patrimonial yang masih kuat memberikan keuntungan kepada pimpinan tertinggi dalam struktur birokrasi.

Di tingkat lokal, Kepala daerah memegang kendali atau berada pada pucuk



tertinggi dalam struktur kekuasaan birokrasi. Sehingga kepentingan-kepentingan birokrasi berkolaborasi dengan kepentingan-kepentingan birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hierarkhi kekuasaan birokrasi, kepala daerah berperan sebagai penanggungjawab dan pembuat keputusan. Pada konteks Pemerintahan Kabupaten Maros, Hatta Rahman selaku Bupati Maros merupakan pimpinan tertinggi birokrasi pada tataran wilayah Kabupaten Maros. Sehingga birokrasi berperan sebagai aparatur yang mengejawantahkan berbagai instruksi dan perintah langsung dari Hatta Rahman.

Sistem organisasi yang utuh dan terstruktur merupakan kelebihan yang dimiliki oleh birokrasi. Hierarkhi kekuasaan pada birokrasi menyebabkan kekuasaan bekerja secara struktural, sesuai dengan instruksi dan kepentingan dari pimpinan. Pada tataran lingkungan Kabupaten Maros, Hatta Rahman selaku Bupati memiliki kendali besar terhadap kinerja dari birokrasi di wilayah Maros. Secara tidak langsung birokrasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan-kepentingan Hatta Rahman khususnya kepentingan-kepentingan politiknya.

Posisi Hatta Rahman selaku calon *incumbent* dapat dengan mudah mempengaruhi dan memobilisasi dukungan politik dari kalangan birokrat. Sebab di satu sisi karakteristik birokrasi yang dituntut loyal kepada atasannya maka secara tidak langsung akan mendukung kepentingan-kepentingan politik dari atasannya tersebut. Di sisi yang lain posisi-posisi para birokrat (pejabat) pada struktur kekuasaan menyebabkan mereka akan berorientasi untuk mengamankan posisi yang mereka miliki dengan mendukung calon *incumbent*, sebab jika *incumbent* dikalahkan maka boleh jadi posisi mereka akan terancam atau digantikan dengan birokrat yang lain. Sehingga hal tersebut harus diantisipasi oleh para petinggi di

tataran struktural birokrasi. Salah satu strategi yang umum dilakukan para *incumbent* mempengaruhi dan memperoleh dukungan politik dari kalangan birokrasi adalah melalui komersialisasi jabatan.

Komersialisasi jabatan dalam praktek politisasi birokrasi bisa dijelaskan sebagai berikut : Pertama, bahwa seorang birokrat di satu sisi, untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan, pelatihan, dan kenaikan pangkat membutuhkan biaya yang cukup besar. Di sisi yang lain harus merogoh koceknya kembali untuk mendapatkan suatu posisi dalam jenjang karirnya. Oleh karena itu, seorang birokrat harus melakukan komersialisasi jabatan untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama mengikuti pendidikan, pelatihan, dan mendapatkan jabatan baru. Dampak yang muncul adalah seorang birokrat bukannya berusaha mempraktikkan pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan dan pelatihan tetapi melakukan usaha politisasi untuk memperoleh perlindungan (pengamanan) atas posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh pihak lain. Kedua, pada umumnya seperti yang diketahui banyak orang bahwa motivasi para birokrat untuk mengikuti pendidikan dan latihan bukan untuk menguasai keahlian yang profesional tetapi hanya untuk memenuhi syarat formal guna memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan. Politisasi dipandang sebagai sebuah alternatif untuk melicinkan jalan menuju jabatan tersebut. Jadi meskipun sudah diselenggarakan pendidikan dan pelatihan secara profesional tetapi begitu mulai melaksanakan pekerjaannya para birokrat tadi kembali menempuh langkah-langkah politisasi untuk mengamankan posisi jabatannya.

Di lingkup birokrasi Kab. Maros, pengamanan posisi jabatan menjadi salah satu bentuk timbal balik politik setelah memilih *incumbent* ini, sebab pada dasarnya rotasi kepemimpinan di suatu daerah dapat juga merubah tatanan jajaran pejabat

pegawai negeri. Oleh karena itu, banyak PNS yang tetap mendukung Hatta Rahman demi menjaga posisi jabatannya agar tidak tergeser oleh orang lain. Berikut hasil wawancara dengan Camat Mandai menjelaskan mengenai:

*“Meskipun saya baru sebentar menjabat menggantikan camat lalu yang terkena kasus, namun saya memilih pak Hatta Rahman, ini sebuah kepercayaan bagi saya dan juga kinerja pak Hata Rahman terbilang baik membangun tatanan birokrasi di Maros, dan saya mendukung beliau”<sup>54</sup>*

Wawancara ini secara tidak langsung dapat diinterpretasikan sebagai sebuah hal yang mengandung unsur politisasi jabatan. Menjaga posisi jabatan perseorangan menjadi alasan keberpihakan kepada Hatta Rahman, oleh karena itu banyak PNS yang memilih Hatta Rahman. Hal inilah yang menjadi salah satu basis kekuatan Hatta Rahman untuk melanggengkan kemenangannya di kontestasi politik Kab. Maros.

Jumlah birokrasi yang cukup besar didukung oleh loyalitas mereka merupakan salah satu kekuatan politik yang besar yang dimanfaatkan oleh Hatta Rahman selaku calon *incumbent* untuk memenangkan Pilkada Maros Tahun 2015.

## **2. Akses terhadap Penguasaan Sumber Daya**

Birokrasi adalah organisasi yang menjadi instrumen penyelenggaraan berbagai pelayanan publik, oleh karena itu birokrasi memiliki akses terhadap penguasaan sumber daya. Penguasaan terhadap sumber daya merupakan salah satu kekuatan penting yang dimiliki oleh birokrasi. Ketidaknetralan birokrasi dapat berujung pada pemanfaatan berbagai sumber daya diantaranya anggaran negara dan

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bpk Andi Mappalewa selaku Camat Mandai

fasilitas negara untuk kepentingan pragmatis dari pihak-pihak tertentu.

Netralitas birokrasi pada setiap momentum kontestasi kekuasaan selalu menjadi permasalahan yang umum terjadi. Birokrasi adalah kelompok yang sangat rawan untuk disalahgunakan oleh elite-elite politik untuk kepentingan politik pragmatis, khususnya bagi *incumbent*. *Incumbent* memiliki pengaruh besar terhadap birokrasi. Para *incumbent* berusaha mengonsolidasikan organisasi birokrasi untuk memenangkan mereka pada pemilu.

Politisasi birokrasi berupa penggunaan fasilitas negara sangat bisa dilihat menjelang pemilihan umum. Meskipun tentang netralitas birokrasi telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1999 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tidak bertindak diskriminatif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi bagi seorang calon kepala daerah yang *incumbent*, sangat sulit untuk mematuhi. Karena dia berada pada posisi memiliki segalanya, jabatan, uang, dan kekuasaan. Seperti kata Lord Acton: *power tend to corrupt*. Siapapun yang memiliki kekuasaan cenderung korup. Beberapa hasil penelitian melaporkan adanya fasilitas negara yang turut dipakai pada saat proses rapat-rapat konsolidasi, lobi politik dengan partai politik lain, dan kampanye (mobilisasi massa). Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas, pakaian dinas, dan ruang-ruang rapat (gedung gedung) milik negara. Penggunaan fasilitas negara ini bisa dilakukan oleh birokrat birokrat yang sedang menjalani proses politik (Pemilu).

Suara pegawai negeri menjadi salah satu modal yang menjanjikan pada setiap momen-momen pemilu, begitupun di ranah politik Kab. Maros. Berikut wawancara dengan Anggota DPRD Kab. Maros Bpk. Andi Syahril:

*“Ada beberapa pegawai yang mendukung hatta rahman baik itu dari kalangan pns, ataupun instansi masyarakat yang mengaku mendukung seorang hatta rahman, dengan alasan hampir rata-rata mengatakan bahwa kinerja seorang bapak hatta rahman sudah terakui dengan banyaknya infarastruktur jalan yang sudah baik.”<sup>55</sup>*

Hal tersebut juga diperkuat oleh informasi dari portal berita online berikut ini:

Gambar 4.1  
Ketidaknetralan Aparat Birokrasi Kab. Maros



Sumber: *berita-sulsel.com*

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bpk. Andi Syhril selaku Anggota DPRD Kab. Maros

Foto sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lengkap dengan pakaian dinas yang menenteng simbol salah satu kandidat Bupati dan wakil Bupati Maros beredar luas melalui jejaring media sosial. Gambar yang diperkirakan direkam di ruang kerja mantan Bupati Maros, Hatta Rahman ini, begitu tampak jelas memperlihatkan belasan PNS ini mengacungkan dua jari mereka sebagai simbol pasangan Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang (Hatita) jilid dua.<sup>56</sup>

Hal di atas dapat di artikan bahwa, tidak sepenuhnya apa yang dilakukan Hatta Rahman dalam proses kemenangannya diraih dengan modalnya. Tidak bisa di pungkiri bahwa kuasa *incumbent* secara langsung maupun tidak langsung dapat dengan mudah menggerakkan apapun dalam proses perpolitikan. Penggunaan fasilitas daerah secara mungkin memudahkan akses kampanyenya dan mengurangi anggaran biaya yang di butuhkan.

Pemanfaatan suara pegawai negeri ini jelas sangat mudah bagi kandidat *incumbent*. Dengan iming-iming janji akan diberi jabatan atau perintah untuk mendukung atasannya, mobilisasi pegawai negeri pada saat pemilu dan pilkada sangat banyak terjadi baik proses pemilihan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan juga pusat.

### 3. Instrumen Komunikasi Pemerintah

Birokrasi merupakan instrumen bagi pemerintah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. Komunikasi tersebut dapat terjalin diantaranya melalui proses penyelenggaraan pelayanan publik. Hegel mencitrakan birokrasi sebagai *mediating agent*, penjemabatan antara kepentingan-kepentingan masyarakat

---

<sup>56</sup>Admin, "Foto PNS Maros Berkampanye Beredar di Medsos," *Berita-Sulsel.com*. 12 Agustus 2018.<http://berita-sulsel.com/2015/08/12/foto-pns-maros-berkampanye-beredar-di-medsos/>(4 Maret 2018).

dengan kepentingan pemerintah. Dan melihat fungsi birokrasi sebagai penghubung antara negara dan *civil society*. Negara mengefektifkan kepentingan umum, sedang *civil society* merepresentasikan kepentingan khusus yang ada di dalam masyarakat. Karena tugasnya sebagai alat pemerintah maka birokrasi harus memiliki kemandirian.<sup>57</sup>

Baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi sangat terkait dengan kemampuan dan kualitas dari birokrasi itu sendiri. Kemampuan birokrat pemerintahan selain dibentuk melalui pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan keahlian individu juga sangat dipengaruhi oleh sistem organisasi tersebut seperti orientasi kerja, struktur organisasi, model kepemimpinan yang diterima oleh aparatur.

Peran pemerintah seharusnya yang selama ini sebagai *ruler* seharusnya diganti dengan sebagai fasilitator dengan demikian menempatkan paradigma baru dengan menempatkan birokrasi sebagai fasilitator bukan sebagai ruler atau patron. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut tetap harus diupayakan demi memberikan pelayanan yang baik kepada publik dan mampu memperbaiki citra birokrasi yang selama ini dianggap gagal sebagai media perantara masyarakat

Bekerjanya birokrasi yang baik merupakan satu ukuran baik yang bisa dilihat masyarakat dengan begitu kepercayaan masyarakat kembali dan inilah salah satu yang dilakukan seorang Hatta Rahman dalam menata maros yang lebih sejahtera sehingga masyarakat maros melihat proses kinerja birokrasi yang tertata rapi, dengan begitu citra seorang Hatta Rahman ini di masyarakat maros mendapat apresiasi lebih, contoh bagaimana birokrasi ikut andil sebagai media penyedia antara

---

<sup>57</sup> Irfan Setiawan, *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014), h. 3.

pemerintah dan masyarakat yaitu proses pembuatan KTP yang dulu begitu lama proses pembuatannya, dan sekarang dengan sistem dan kinerja aparatur yang baik proses pembuatan KTP dapat dengan mudah dan cepat pelayanannya, dan bukan hanya itu masyarakat tingkat bawah dapat merasakan bagaimana dalam perumusan-perumusan masalah-masalah di internal desa dapat menyuarakan haknya, rapat-rapat internal dikantor desa, seperti yang diungkapkan salah seorang warga di Pattene Burhanuddin.

*“Saya biasa ikut rapat dalam kantor lurah dan menyuarakan hak saya sebagai masyarakat, seperti permintaan perbaikan jalan dan infrastruktur lainnya dan Alhamdulillah bisa kita lihat hasilnya jalan-jalan sudah di perbaiki.”*

Dalam teori komunikasi, setiap aktor membutuhkan ruang komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan mereka kepada komunikan atau penerima pesan. Birokrasi dapat menjadi media komunikasi yang efektif bagi calon *incumbent* untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Sebab birokrasi dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui pelayanan-pelayanan publik. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang politik bagi para calon *incumbent* untuk menarik simpati masyarakat. Sehingga birokrasi tidak hanya sebagai instrument bagi Negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melainkan juga menjadi instrument politik bagi para calon *Incumbent* untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat luas.

Hal ini juga yang dilakukan oleh Hatta Rahman. Melalui pelayanan dan peningkatan kinerja birokrasi di Kab. Maros yang diupayakan oleh Hatta Rahman maka berdampak pada tingginya simpati dan dukungan politik masyarakat luas di



Kab. Maros kepada Hatta Rahman. Hal tersebut menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Hatta Rahman.

#### **4. Pelaksana Kebijakan Publik**

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintah, tetapi juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.<sup>58</sup>

Birokrasi merupakan instrumen yang mengefektifkan kebijakan dari pemerintah. Sebagai instrumen pengefektifan kebijakan publik, birokrasi memiliki kelebihan-kelebihan diantaranya penguasaan atas sumber daya dan akses langsung di masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu kekuatan politik cukup penting yang dimiliki birokrasi. Sebagai instrumen yang menjalankan kebijakan-kebijakan publik maka masyarakat memiliki ketergantungan dengan birokrasi untuk memperoleh hak-haknya khususnya sebagai warga negara, diantaranya memperoleh pelayanan kesehatan ataupun administrasi. Pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi juga dapat dinilai oleh masyarakat. Dalam hal ini kinerja birokrasi yang baik dapat berdampak positif pada penilaian masyarakat terhadap kinerja Hatta Rahman selaku Bupati Maros pada periode sebelumnya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan berikut ini:

---

<sup>58</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: MedPress, 2007), h. 202.

*“Program-program yang di lakukan seorang bapak hatta rahman sudah bisa dikatakan baik karena dalam proses pengurusan misalnya pengurusan KTP,BPJS tidak serumit dulu. artinya sekarang proses mengurus di kantor desa ataupun kantor camat sudah cepat dan di layani dengan baik”.<sup>59</sup>*

Secara garis besar dalam pilkada Kab.Maros, Hatta Rahman mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mengimplementasikan strategi kampanyenya dalam rangka proses pemenangan pilkada, karena Hatta Rahman calon *incumbent* dan memiliki beberapa keuntungan, yakni menguasai akses sosial terhadap sipil. Penguasaan terhadap akses sosial ataupun loyalis ini sangat penting karena akan mendongkrak elektabilitas kandidat guna meraih kemenangan. Seperti yang di ungkapkan Anggota DPRD Kabupaten Maros Andi Syahrir, bahwa :

*“Beliau (hatta rahman) memiliki sumbangsi yang sangatlah besar bagi kesejahteraan masyarakat Maros, jadi wajarlah kalau masyarakat Maros memilih beliau, selain itu beliau juga merupakan sosok yang berpengalaman dan cerdas yang mampu membawa perubahan lebih baik untuk Maros”<sup>60</sup>*

Kemenangan Hatta Rahman pada Pilkada Maros tahun 2015, tidak dapat dilepaskan dari kinerja dari aparat birokrasi pemerintah Kab. Maros dalam menyelenggarakan pelayanan publik di masyarakat. Melalui pelayanan publik, Hatta Rahman selaku calon *incumbent* menarik simpati dan dukungan masyarakat Kab. Maros melalui efektivitas dan baiknya pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi.

---

<sup>59</sup> Kamaruddin, Masyarakat Mandai. wawancara tanggal 25 Desember 2017

<sup>60</sup> Andi Syahrir. Anggota DPR fraksi Nasdem, wawancara tanggal 25 Desember 2017

## 5. Representasi Kepemimpinan Politik

Akses dan indikator dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tersebut adalah kuatnya fungsi aparatur birokrasi pemerintah daerah yang berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam mengatasi persoalan daerah adalah diletakkan pada dua hal, yaitu pertama, keseimbangan internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ pemerintahan daerah dan masyarakat, khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, keseimbangan eksternal, yang menekankan pemerintah daerah sebagai entitas sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang hendaknya memperhatikan hubungan antara pemerintah daerah dengan seluruh *stakeholder* daerah sebagai perwujudan dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah. Masing-masing *stakeholder* memiliki kontribusi untuk membentuk *governance* yang baik.<sup>61</sup>

Birokrasi pada dasarnya merupakan cerminan kepemimpinan politik. Efektivitas dan manajemen birokrasi yang baik dapat berdampak pada terimplementasinya kebijakan dengan baik. Sebaliknya kinerja birokrasi yang buruk akan berujung pada buruknya kinerja pemerintah di mata masyarakat. Kinerja birokrasi yang baik akan mekonstruksi keberhasilan kepemimpinan politik dari elite politik. Sebaliknya semerawutnya manajemen birokrasi dapat berdampak pada citra buruk dari kepemimpinan elite politik.

---

<sup>61</sup> Titik Djumiarti, Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), journal Vol 1, Th. 2014., Hal 9

Terciptanya birokrasi yang baik sangat tergantung bagaimana pemimpin yang ada dalam daerah tersebut, ibarat pepatah jika guru kencing berdiri maka murid kencing berlari artinya seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik agar yang dipimpinnya juga menjadi baik. Efektivitas kinerja birokrasi yang dianggap cukup baik oleh masyarakat merepresentasikan kepemimpinan Hatta Rahma selaku Bupati Maros yang dianggap cukup berhasil. Hal tersebut mendorong popularitas dari Hatta Rahman sehingga dapat terpilih kembali pada periode keduanya.

Kepercayaan masyarakat kepada sosok Hatta Rahman untuk memimpin Kab. Maros sudah terakui dengan program-program yang berhasil diwujudkannya pada periode sebelumnya, diantaranya perbaikan infrastruktur. Program-program tersebut diimplementasikan dengan baik oleh aparat birokrasi di bawah kepemimpinan Hatta Rahman.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Bentuk Kekuatan Politik Hatta Rahman Terhadap Birokrasi Di Kab. Maros Pada Pilkada Kab. Maros Tahun 2015, diperoleh hasil yang mempengaruhi keterpilihan Hatta Rahman di panggung politik Kab. Maros disamping karena jaringan sosial yang kuat dan didukung oleh partai politik, juga dipengaruhi oleh akses yang besar untuk memperoleh dukungan dari kalangan birokrasi di Kab. Maros. Birokrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah, yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah presiden dan Lembaga-lembaga Non Departemen, baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti di tingkat Propinsi, Kabupaten, dan Kecamatan, bahkan pada tingkat Kelurahan dan Desa.

Salah satu strategi politik yang dilakukan *incumbent* untuk melanggengkan kekuasaannya adalah dengan memanfaatkan kekuatan birokrasi. Strategi politik dengan memanfaatkan birokrasi merupakan strategi yang cukup efektif untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada.

Adapun beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kemenangan Hatta Rahman tersebut antara lain; jaringan yang luas dan sistem organisasi yang masif, akses terhadap penguasaan sumber daya, instrumen komunikasi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, dan representasi kepemimpinan politik.

Birokrasi memiliki sistem organisasi yang kuat dan terstruktur. Setiap pegawai dituntut untuk loyal terhadap atasannya sehingga pola-pola patrimonial bekerja cukup kuat dalam sistem birokrasi. Posisi Hatta Rahman selaku calon *incumbent* dapat dengan mudah mempengaruhi dan memobilisasi dukungan politik dari kalangan birokrat. Penguasaan terhadap sumber daya merupakan juga merupakan salah satu kekuatan penting yang dimiliki oleh birokrasi.

Birokrasi dapat menjadi media komunikasi yang efektif bagi calon *incumbent* untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini juga yang dilakukan oleh Hatta Rahman. Melalui pelayanan dan peningkatan kinerja birokrasi di Kab. Maros yang diupayakan oleh Hatta Rahman maka berdampak pada tingginya simpati dan dukungan politik masyarakat luas di Kab. Maros kepada Hatta Rahman. Hal tersebut menjadi modal sosial yang dimiliki oleh Hatta Rahman.

Birokrasi merupakan instrumen yang mengejawantahkan kebijakan dari pemerintah serta merupakan cerminan dari kepemimpinan politik. Kinerja birokrasi yang baik akan menkonstruksi keberhasilan kepemimpinan politik dari elite politik. Sebaliknya semerawutnya manajemen birokrasi dapat berdampak pada citra buruk dari kepemimpinan elite politik.

### **B. Implikasi**

Keterlibatan dalam politik adalah hak dari setiap warga negara, namun sebagai Aparatur Sipil Negara, birokrasi harus menghindari keterlibatan pada politik praktis, termasuk mendukung kepentingan-kepentingan politik pragmatis dari pimpinan mereka dalam struktur birokrasi sehingga dapat berujung pada maksimalisasi peran dan fungsi mereka pada pelayanan publik yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Agustina, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

\_\_\_\_\_, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Cholisin & Nasiwan, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Djumiarti, Titik, Peran Budaya Birokrasi Dalam Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), journal Vol 1, Th. 2014,.

Fatayati, Sun, Branding Politik Joko Widodo dalam Pilpres 2014 di Media Online, *Jurnal Tribakti*, Volume 27 Nomor 1 Januari 2016.

Hawwa, Sa'id, *al-Aqa'idah al-Islamiyah*, Juz 1, Cet. II, Beirut: Dar al-Salam Liltaba'ih wa al-Nasyar, 1992.

Irwan, Alexander, *Pemilu pelanggaran asas luber*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 1990.

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, *Jami'al-Bayan Fi Ta'Wil al-Qur'an*, Juz. 6, Cet. I, Beirut : Mu'Assisah al-Risalah, 2000.

Niadharna, Ajeng, Strategi Pemasaran Politik Pasangan Sambari-Qosim Dalam Pemilihan Kepala Daerah Gresik Tahun 2015, *Jurnal Politik Muda*, Vol. 5, Nomor 3, Agustus –Desember 2016.

Rahmayanti, Dian Rhesa, Pemasaran Politik (Political Marketing) Partai Golongan Karya Dan Partai Demokrat. (Studi Tentang Perbandingan Pemasaran Politik Partai Golkar Dan Partai Demokrat Dalam Rangka Menarik Massa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Di Daerah Pilihan II Kabupaten Madiun", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- Schroder, Peter, *Strategi Politik*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2004.
- Setiawan, Irfan. *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014..
- Sitanggang, Hartini Basaria Natasya, dan Awang Dharmawan, Strategi Marketing Hary Tanoesoedibjo dalam Usaha Membangun Personal Branding Politik, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, Vol. 20 No.1 Juni 2016.
- Syamsuddin, dkk. *Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal*, Ponorogo: Cv. Wade Group, 2015.
- Wahid, Umaimah, Personal Branding dan Retorika Komunikator Politik Pada Pemilukada DKI Jakarta 2017 (Analisis Retorika Atas Teks Pidato Sebagai Kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur Pada Penentuan Nomor Urut Peserta Pemilu), *Prosiding Seminar Nasional : Komunikasi Publik dan Dinamika Masyarakat Lokal*, ISBN: 978-602-60465-0-5.
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Zamroni, Mohammad, “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender”, *Jurnal Dakwah*, vol. XIV, no. 1, 2013.

Referensi Internet:

- Admin, “Foto PNS Maros Berkampanye Beredar di Medsos,” *Berita-Sulsel.com*. 12 Agustus 2018. <http://berita-sulsel.com/2015/08/12/foto-pns-maros-berkampanye-beredar-di-medsos/>. 4 Maret 2018.
- [www.maroskab.bps.go.id](http://www.maroskab.bps.go.id)



### Lampiran Wawancara Bersama Narasumber



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh.Irfan yang sering dipanggil oleh orang-orang yaitu (Person) dilahirkan di Majang, Desa Lallatang kec.Dua Boccoe Kabupaten Bone pada Tanggal 17 November 1994. Anak keempat dari Lima bersaudara hasil buah kasih dari pasangan Dg.Parani(Cottang) Dan Dg.Nakaya(Erni). Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar di SD Negeri 98 Sailong dan lulus pada tahun 2007.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Dua Boccoe dan menyelesaikan studinya pada tahun 2010. Setelah lulus dari sekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 09 Makassar dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2013. Setelah lulus sekolah menengah atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013 dan lulus di jurusan ilmu politik pada fakultas ushuluddin, filsafat, dan politik.

Penulis pernah menjadi pengurus Osis semenjak SMP dan SMA. Semasa kuliah penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HMJ). Dan pernah menjadi pengurus di Organisasi Dpc Kepmi Bone Ke.Dua Boccoe. Penulis menyadari pentingnya berorganisasi karena mengajarkan kita tentang tanggung jawab, sifat mandiri, pantang menyerah dan tidak suka berpangku tangan, sifat inilah yang didapat dari berorganisasi disamping untuk menimba ilmu pengetahuan, organisasi juga mempertemukan teman-teman baru. Tapi dalam berorganisasi harus menjunjung tinggi yang namanya sportifitas untuk mengatur waktu karena ada tugas dan kewajiban yang utama yaitu Akademik.